LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2018



bankriaukepri
tumbuh kembangkan usaha

bankriaukepri
tumbuh kembangkan usaha

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ---------- i

PENDAHULUAN ---------- 1

KEBIJAKAN, PROGRAM, STRUKTUR, MEKANISME TATA KELOLA DAN UNIT KERJA PENGELOLA TATA KELOLA ---------- 2

KEBIJAKAN TATA KELOLA BANK ---------- 2

PROGRAM PENGENALAN DAN PEMAHAMAN TATA KELOLA YANG BAIK ---------- 3

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN ---------- 3

UNIT KERJA PENGELOLA TATA KELOLA BANK ---------- 4

PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK RIAU KEPRI ---------- 4

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ---------- 4

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS ---------- 5

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ---------- 6

DEWAN KOMISARIS ---------- 12

Komposisi Dewan Komisaris ---------- 12

Kriteria Dewan Komisaris ---------- 13

Independensi Dewan Komisaris ---------- 13

Pernyataan Independensi Komisaris Independen ---------- 14

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris ---------- 14

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris ---------- 15

Pemenuhan Ketentuan *Fit & Proper Tes* ---------- 15

Tugas Dewan Komisaris ---------- 16

Wewenang Dewan Komisaris ---------- 17
Kinerja Dewan Komisaris ---------- 18
Rapat Dewan Komisaris ---------- 20
Kebijakan dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris ---------- 24
Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan Komisaris ---------- 24
Program Orientasi Dewan Komisaris ---------- 25
Program Pelatihan dan Seminar Dewan Komisaris ---------- 26
Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris ---------- 28
Komisaris Independen ---------- 29

DIREKSI ---------- 30
Kriteria Direksi ---------- 30
Komposisi Direksi ---------- 30
Uji Kelayakan dan Kepatutan Direksi ---------- 30
Tugas dan Tanggung jawab Direksi ---------- 31
Tugas dan Tanggung jawab Masing-masing Direksi ---------- 31
Independensi Direksi ---------- 34
Rangkap Jabatan Direksi ---------- 34
Kepemilikan Saham Direksi ---------- 34
Rapat Direksi ---------- 35
Penilaian Kinerja Direksi ---------- 39
Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Direksi ---------- 39
Program Pelatihan dan Seminar Direksi ---------- 41
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ---------- 43

RASIO GAJI DAN KOMPOSISI PEGAWAI ---------- 44
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah ---------- 44
Komposisi Pegawai ---------- 44

KOMITE AUDIT ---------- 45
Susunan Anggota Komite Audit ---------- 45
Keahlian dan Independensi Komite Audit ---------- 46
Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit ---------- 46
Rencana dan Realisasi Kegiatan Komite Audit ---------- 47
Aktivitas Rapat Komite Audit ---------- 48

KOMITE PEMANTAU RISIKO ---------- 52
Komposisi Komite Pemantau Risiko ---------- 52
Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko ---------- 52
Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko ---------- 52
Rencana dan Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko ---------- 53
Aktivitas Rapat Komite Pemantau Risiko ---------- 54

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI ---------- 56
Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi ---------- 56
Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi ---------- 57
Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi ---------- 57
Rencana dan Realisasi Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi ---------- 58
Aktivitas Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi ---------- 58

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF YANG DIMILIKI OLEH BANK ---------- 60
Komite Teknologi Informasi ---------- 60
Komite Manajemen Risiko ---------- 61
Komite Pembiayaan ---------- 63
Komite ALCO ---------- 64
Komite Kebijakan Perkreditan ---------- 67
Komite Sumber Daya Manusia ---------- 68
Komite Anti *Fraud* ---------- 69

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN ---------- 71

PENERAPAN FUNGSI DAN BUDAYA KEPATUHAN ---------- 71
Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan ---------- 72
Unit Kerja di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko ---------- 75
Sistem Kepatuhan ---------- 77
Kegiatan Unit Kerja Kepatuhan ---------- 77

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN ---------- 79
Susunan Organisasi dan Panduan Kerja Audit Intern ---------- 79
Persyaratan Auditor Internal ---------- 80
Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal ---------- 80
Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) ---------- 81
Laporan Kegiatan Audit Internal ---------- 82
Program Pengendalian Mutu ---------- 83

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN ---------- 84

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO ---------- 86
Organisasi Manajemen Risiko ---------- 86
Kebijakan Manajemen Risiko ---------- 86
Laporan Profil Risiko ---------- 87
Pengelolaan Risiko ---------- 90
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi ---------- 90
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit ---------- 91
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian
Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko ---------- 91

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR ---------- 92

RENCANA STRATEGIS BANK ---------- 92
Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh Bank ---------- 92
Rencana Jangka Pendek ---------- 96
Rencana Jangka Menengah ---------- 99

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK --------- 100
KEPEMILIKAN SAHAM DAN *SHARES OPTION* ---------- 101
PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*) ---------- 101
PERMASALAHAN HUKUM ---------- 102
BUY BACK SHARES DAN *BUY BACK* OBLIGASI BANK ---------- 102

UNIT USAHA SYARIAH (UUS) ---------- 102
Dewan Pengawas Syariah (DPS) ---------- 103
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) ---------- 103
Pedoman Dewan Pengawas Syariah (DPS) ---------- 104
Opini dan Aktivitas Dewan Pengawas Syariah ---------- 104
Frekuensi Rapat ---------- 107
Remunerasi dan Fasilitas Lainnya DPS ---------- 109
Rangkap Jabatan DPS ---------- 110
Jumlah Penyimpangan (Internal *Fraud*) dan Permasalahan Hukum Yang Terjadi -------- 110
Pendapatan Non Halal Dan Penggunaannya ---------- 111
Penggunaan Konsultan atau Penasehat ---------- 111

PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK ---------- 111

KEGIATAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK TAHUN 2018 ---------- 112

Penilaian Penerapan Tata Kelola oleh Pihak Eksternal (Third party assessment) --------- 112

Penghargaan Tata Kelola Perusahaan ---------- 113

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PENERAPAN TATA KELOLA BANK ---------- 114

PENDAHULUAN

Bank Riau Kepri memandang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan merupakan hal penting dalam menjaga kelangsungan usaha yang sehat dan dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang saham (*shareholders*) serta memelihara dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan *(stakeholders)* maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kepercayaan s*takeholders* sebagai pemangku kepentingan, merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Bank. Kredibilitas Bank dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Bank dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Bank selain harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Bank.

Penerapan Tata Kelola yang Baik dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap *fraud* dan penyalahgunaan kewenangan. Pokok-pokok pelaksanaan Tata Kelola yang Baik diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparasi kondisi keuangan dan non keuangan

Penerapan tata kelola yang baik bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan Bank dengan baik, sehingga mengarah pada praktek-praktek bisnis terbaik yang sesuai dengan standar yang dimiliki. Dengan komitmen dan kepatuhan pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap Bank Riau Kepri. Sistem Tata Kelola memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditur, agar mereka yakin untuk memperoleh return atas investasinya. Tata Kelola juga membantu menciptakan lingkungan kondusif sehingga terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* pada perusahaan.

Bank Riau Kepri memiliki pedoman Tata Kelola yang dilaksanakan secara konsisten untuk mencapai kesinambungan usaha yang memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Tata Kelola Bank Riau Kepri disusun berdasarkan pada prinsip- prinsip :

Prinsip - Prinsip Tata Kelola yang Baik	**Transparansi (*transparency*),** Keterbukaan Bank Riau Kepri dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dimana Bank senantiasa memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi tersebut juga mudah diakses *stakeholders* sesuai dengan haknya.
Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Setiap komponen organisasi di Bank Riau Kepri mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta dapat memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola.	**Pertanggungjawaban (*responsibility*)** kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Dalam hal ini bank harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Disamping itu, Bank harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).
Independensi (*independency*) Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank Riau Kepri secara sungguh-sungguh dan konsisten menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan Bank.	**Kewajaran (*fairness*)** Bank Riau Kepri senantiasa menjamin pemenuhan hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Riau Kepri juga memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).

KEBIJAKAN, PROGRAM, STRUKTUR, MEKANISME TATA KELOLA DAN UNIT KERJA PENGELOLA TATA KELOLA

KEBIJAKAN TATA KELOLA BANK

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut khususnya yang menyangkut dengan kebijakan Tata Kelola Bank, hal ini ditandai dengan telah diterbitkannya Keputusan Direksi Nomor 082/KEPDIR/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola yang Baik, selain telah menerbitkan Kebijakan tentang *Compliance Charter* (Piagam Kepatuhan) sebagaimana termuat di dalam Keputusan Direksi Nomor 67/KEPDIR/2013 tanggal 31 Juli 2013, Bank pada tahun 2015 telah menerbitkan ketentuan mengenai Pedoman Kerja Direksi sebagaimana yang termuat di dalam Keputusan Direksi Nomor 58/KEPDIR/2015 tanggal 30 Oktober 2015 berikut perubahannya.

Pada tahun 2018, Kebijakan Direksi tersebut di atas diubah dan disesuaikan dengan memperhatikan kondisi terkini dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termuat di dalam SK Direksi No. 111/KEPDIR/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pedoman Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Di dalam pedoman kerja Direksi diatur secara tegas mengenai fungsi, persyaratan, komposisi, tugas dan tanggung jawab Direksi, etika kerja dan jabatan, waktu kerja, hak dan kewenangan, pengaturan mengenai rapat Direksi serta komite-komite yang berada di bawah Direksi.

Sebelumnya pada tahun 2014 Bank juga telah menerbitkan ketentuan mengenai pedoman kerja Dewan Komisaris sebagaimana yang termuat di dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014.

Di dalam pedoman kerja Dewan Komisaris diatur secara tegas mengenai persyaratan, komposisi serta tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, etika jabatan, waktu kerja Dewan Komisaris, pengaturan mengenai rapat Dewan Komisaris dan organ-organ yang berada di bawah Dewan Komisaris.

PROGRAM PENGENALAN DAN PEMAHAMAN TATA KELOLA YANG BAIK

Dalam rangka pengenalan dan pemahaman Tata Kelola yang Baik kepada pegawai di lingkungan Bank, Divisi Kepatuhan telah memberikan sosialisasi/pelatihan terkait Kebijakan Tata Kelola Bank, Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct), Whistleblowing System* dan monitoring penerapan Budaya Kepatuhan di jaringan kantor Bank yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan adanya program pengenalan dan pemahaman Tata Kelola yang Baik yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan tersebut diharapkan akan mampu membangun kesadaran tentang arti pentingnya Tata Kelola Bank yang baik dalam setiap aktivitas operasional Bank.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), struktur tata kelola Bank Riau Kepri secara garis besar tergambarkan pada organ utama perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu Bank Riau Kepri juga membentuk organ pendukung Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Sedangkan organ pendukung Direksi terdiri dari Komite Sumber Daya Manusia, Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite ALCO, Komite Anti *Fraud*.

Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.

UNIT KERJA PENGELOLA TATA KELOLA BANK

Saat ini Bank Riau Kepri telah menyempurnakan struktur dan tata kelola Bank sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha, sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Direksi Nomor 66/KEPDIR/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 150/KEPDIR/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 66/KEPDIR/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Di dalam Keputusan Direksi tersebut ditetapkan bahwa Divisi Kepatuhan di bawah Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko bertugas sebagai pengelola Tata Kelola Bank. Salah satu bentuk pengelolaan Tata Kelola Bank yang dilakukan adalah melaksanakan internalisasi pelaksanaan Tata Kelola yang Baik, berupa pengenalan dan penerapan pelaksanaan Tata Kelola yang Baik kepada seluruh pegawai Bank, melalui sosialisasi tentang Tata Kelola yang Baik, Kode Etik Kepatuhan, *Whistle Blowing System* dan monitoring penerapan Budaya Kepatuhan di jaringan kantor Bank.

Selain itu, setiap periode semester, Divisi Kepatuhan juga melakukan penilaian sendiri *(self assesment)* pelaksanaan Tata Kelola Bank yang hasil penilaiannya disampaikan di dalam Laporan Tingkat Kesehatan Bank untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK RIAU KEPRI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan bisnis dan operasional Perseroan termasuk jumlah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, pembayaran dividen dan pembagian keuntungan, persetujuan tentang Laporan Tahunan, penunjukan auditor independen, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan pendelegasian wewenang kepada Direksi untuk menindaklanjuti pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan disetujui oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha perusahaan. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan. Hal-hal yang dibicarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham dimuat di dalam Akta RUPS baik yang sifatnya Tahunan maupun Luar Biasa.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, Dewan Komisaris bersama

Direksi telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS pada tahun 2016 terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Bank berakhir. Materi yang disampaikan di dalam RUPS Tahunan, meliputi antara lain :

1. Penyampaian laporan tahunan Direksi yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
2. Penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Penyampaian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan.
4. Penetapan penggunaan laba, dalam hal Bank mempunyai saldo laba yang positif.
5. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Untuk RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Bank guna membicarakan dan memutuskan mata acara rapat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Bank.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Tata cara penyelenggaran RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diatur di dalam Anggaran Dasar Bank Riau Kepri yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di dalam perubahan anggaran dasar Bank Nomor : 1156 tanggal 29 November 2018 diatur mengenai tata cara pemanggilan RUPS, antara lain sebagai berikut :

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yaitu di wilayah operasional kantor pusat dan/atau kantor cabang perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. Panggilan RUPS harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
5. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2, 3 dan 4, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Untuk penyelenggaraan RUPS tahun 2018, Bank telah menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut :

PEMBERITAHUAN JADWAL DAN AGENDA RUPS		
Tanggal Pelaksanaan	**Tujuan Surat**	**Mata Acara RUPS**
09 Februari 2018	• Gubernur Riau. • Gubernur Kepulauan Riau. • Seluruh Bupati dan Walikota Provinsi Riau dan Kepri.	**RUPS Tahunan :** • Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017. • Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017. • Persetujuan Anggaran Dana Pembinaan Kemitraan (*Corporate*

		Social Responsibility) tahun 2018. • Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri Tahun Buku 2018. • Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri Tahun 2018. **RUPS Luar Biasa :** • Persetujuan Penambahan Modal Disetor yang Telah Disetor. • Persetujuan Rencana Tambahan Modal Disetor tahun 2018. • Persetujuan Calon Pengurus Perseroan. • Persetujuan Calon Dewan Pengawas Syariah. • Penetapan Dividen Saham. • Penetapan Penyertaan Modal ke PT. Jamkrida dan BPR Gemilang. • Persetujuan *Spin Off* Bank Riau Kepri Syariah. • Persetujuan Tata Kelola Pembelian Obligasi. • Persetujuan Manfaat Pensiun PT. Bank Riau Kepri.
19 September 2018	• Gubernur Riau. • Gubernur Kepulauan Riau. • Seluruh Bupati dan Walikota Provinsi Riau dan Kepri.	Pembahasan Pencalonan Pengurus Perseroan.
29 November 2018	• Gubernur Riau. • Gubernur Kepulauan Riau. • Seluruh Bupati dan Walikota Provinsi Riau dan Kepri.	• Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. • Persetujuan Perubahan Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Pengurus Perseroan. • Penetapan Pencalonan Pengurus Perseroan.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Sepanjang Tahun 2018, Bank telah melaksanakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN		
Tanggal Pelaksanaan	**Tempat**	**Agenda Rapat**
09 Februari 2018	Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri	• Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017. • Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017. • Persetujuan Anggaran Dana Pembinaan Kemitraan (*Corporate Social Responsibility)* tahun 2018. • Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri Tahun Buku 2018. • Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri Tahun 2018.

RUPS Tahunan dipimpin oleh Komisaris Utama yaitu Bapak H.R. Mambang Mit. Penunjukan Komisaris Utama sebagai pemimpin rapat telah memperhatikan pasal 9 ayat (7) dan (8) anggaran dasar Bank.

RUPS Tahunan Bank dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya, dan telah memenuhi syarat dan sah untuk mengambil keputusan.

Dari hasil pembahasan terhadap agenda RUPS Tahunan menghasilkan berbagai keputusan-keputusan diantaranya, sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 yaitu Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen Perseroan tahun buku 2017 sesuai dengan yang diusulkan.
3. Menyetujui untuk penggunaan cadangan jasa produksi dan tantiem tahun buku 2017 yang telah menjadi biaya tahun buku 2017 dengan komposisi jasa produksi 22,5 % dan tantiem pengurus 2,5 %.
4. Menyetujui komposisi cadangan jasa produksi dan tantiem pengurus untuk tahun buku 2018 sama dengan tahun buku 2017.
5. Menyetujui anggaran Dana Pembinaan Kemitraan (*Corporate Social Responsibility)* Tahun 2018 sebesar Rp21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) yang alokasi pembagian dana kemitraan berdasarkan besaran saham dan telah dianggarkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2018, yang pelaksanaannya akan diatur oleh Direksi dan penyalurannya dilaksanakan melalui Cabang..

6. Menyetujui penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Terbatas PT. Bank Riau Kepri tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.
7. Menyetujui besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri tahun 2018 adalah sebesar Rp44.296.871.411,- (empat puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah) sesuai dengan rincian yang diajukan.

Seluruh agenda dan keputusan rapat RUPS Tahunan ini selanjutnya dituangkan di dalam Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor : 10 tanggal 09 Februari 2018 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Riau Kepri.

Selain menyelenggarakan RUPS Tahunan tahun 2018, Bank juga telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu sebagai berikut :

I. RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 09 Februari 2018

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA		
Tanggal Pelaksanaan	**Tempat**	**Agenda Rapat**
09 Februari 2018	Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri	• Persetujuan Penambahan Modal Disetor yang Telah Disetor. • Persetujuan Rencana Tambahan Modal Disetor tahun 2018. • Persetujuan Calon Pengurus Perseroan. • Persetujuan Calon Dewan Pengawas Syariah. • Penetapan Dividen Saham. • Penetapan Penyertaan Modal ke PT. Jamkrida dan BPR Gemilang. • Persetujuan *Spin Off* Bank Riau Kepri Syariah. • Persetujuan Tata Kelola Pembelian Obligasi. • Persetujuan Manfaat Pensiun PT. Bank Riau Kepri.

RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Komisaris Utama yaitu Bapak H.R. Mambang Mit. Penunjukan Komisaris Utama sebagai pemimpin rapat telah memperhatikan pasal 9 ayat (7) dan (8) anggaran dasar Bank.

RUPS Luar Biasa Bank dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya, dan telah memenuhi syarat dan sah untuk mengambil keputusan.

Dari hasil pembahasan terhadap agenda RUPS Luar Biasa tanggal 09 Februari 2018 menghasilkan berbagai keputusan-keputusan diantaranya, sebagai berikut :

1. Menyetujui penambahan modal yang telah disetor Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Menyetujui rencana tambahan modal disetor tahun 2018 sesuai dengan usulan masing-masing pemegang saham :
   a. Koperasi Karyawan Bank Riau Kepri (Saham Seri B) sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
   b. Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
   c. Pemerintah Kabupaten Lingga sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
   d. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
   e. Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
   f. Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
   g. Pemerintah Kabupaten Kuansing sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
   h. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp7.700.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah).
3. Menyetujui masing-masing pemegang saham membuat peraturan tentang pencatatan dividen saham agar dapat dicatat di Bank sebagai tambahan modal disetor sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia yang telah diterbitkan.
4. Meyetujui atas :
   a. Penyertaan Modal PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ke PT. Jamkrida Riau.
   b. Penyertaan Modal PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke BPR Gemilang Tembilahan.
5. Menyetujui atas alternatif modal dalam rangka pelaksanaan *spin off* Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah adalah *Holding Company* dan besaran penyertaan modal yang dapat disertakan Bank Riau Kepri di Bank Umum Syariah Kepri Riau adalah sebesar minimal menurut ketentuan yang berlaku.
6. Menyetujui untuk dapat dilakukannya pembelian obligasi non Pemerintah dengan minimal rating AA.
7. Menyetujui atas surplus pendanaan sebesar Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah) diusulkan untuk dialokasikan pada program peningkatan kesejahteraan peserta Dana Pensiun. Dimana untuk teknis pelaksanaannya diserahkan kepada Direksi Bank Riau Kepri selaku Pemberi Kerja Dana Pensiun Bank Riau Kepri dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun dan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Bank Riau Kepri serta tidak mengganggu likuiditas Bank Riau Kepri.
8. Menetapkan memproses ulang seluruh calon Direktur Kredit dan Syariah dan calon Direktur Dana dan Jasa, dengan waktu yang ditentukan kemudian dalam tahun 2018.
9. Menyetujui mengangkat kembali Dewan Pengawas Syariah yang lama, yaitu :
   - DR. H. Suryan Al Jamrah, MA : Ketua;
   - Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA : Anggota,

dengan masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung dari tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 13 Februari 2021 dan mengusulkan tambahan 1 (satu) calon Dewan Pengawas Syariah yang baru yang diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh agenda dan keputusan rapat RUPS Luar Biasa ini selanjutnya dituangkan di dalam Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor : 11 tanggal 09 Februari 2018 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri.

Untuk menindaklanjuti Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut, Bank telah menuangkan hasil keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 06 tanggal 06 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Pupung Mulyantini, SH, MH, Notaris di Kota Pekanbaru.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut di atas telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh penegasan pemberitahuan perubahan data perseroan, yaitu :

Nomor dan Tanggal Akta	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan		
	Nomor Pemberitahuan	Tanggal Pemberitahuan	Perihal
Akta Nomor 06 Tanggal 06 Maret 2018	AHU-AH.01.03-0098251	07 Maret 2018	Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri

II. RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 19 September 2018

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA		
Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Agenda Rapat
19 September 2018	Hotel Radisson Batam	Pembahasan Pencalonan Pengurus Perseroan.

RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Komisaris Utama yaitu Bapak H.R. Mambang Mit. Penunjukan Komisaris Utama sebagai pemimpin rapat telah memperhatikan pasal 9 ayat (7) dan (8) anggaran dasar Bank.

RUPS Luar Biasa Bank dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya, dan telah memenuhi syarat dan sah untuk mengambil keputusan.

Dari hasil pembahasan terhadap agenda RUPS Luar Biasa tanggal 19 September 2018 menghasilkan berbagai keputusan-keputusan diantaranya, sebagai berikut :

1. Membatalkan seluruh proses seleksi baik dilakukan melalui Komite Remunerasi dan Nominasi maupun yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
2. Menyerahkan kewenangan kepada Gubernur Riau selaku pemegang saham terbesar untuk membentuk Panitia Seleksi Direksi dan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Waktu pelaksanaan seleksi selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2018.

4. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya dilaksanakan di Kota Batam.

Seluruh agenda dan keputusan rapat RUPS Luar Biasa ini selanjutnya dituangkan di dalam Akta Notaris Devi Ananji, SH, M.Kn Nomor : 1367 tanggal 19 September 2018 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri.

III. RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 November 2018

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA		
Tanggal Pelaksanaan	**Tempat**	**Agenda Rapat**
29 November 2018	Hotel Radisson Batam	• Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. • Persetujuan Perubahan Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Pengurus Perseroan. • Penetapan Pencalonan Pengurus Perseroan.

RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Komisaris Utama yaitu Bapak H.R. Mambang Mit. Penunjukan Komisaris Utama sebagai pemimpin rapat telah memperhatikan pasal 9 ayat (7) dan (8) anggaran dasar Bank.

RUPS Luar Biasa Bank dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya, dan telah memenuhi syarat dan sah untuk mengambil keputusan.

Dari hasil pembahasan terhadap agenda RUPS Luar Biasa tanggal 29 November 2018 menghasilkan berbagai keputusan-keputusan diantaranya, sebagai berikut :

1. Menyetujui menugaskan Direksi Bank Riau Kepri untuk melakukan survey, penelitian dan kajian untuk konversi Bank Riau Kepri dari Bank Konvensional menjadi Bank Riau Kepri Syariah.
2. Menyetujui perubahan anggaran dasar.
3. Menyetujui perubahan Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Menyetujui perpanjangan sementara masa jabatan Komisaris Independen Bapak Drs. H. A. Rivaie Rachman yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Desember 2018 sampai dengan diangkatnya Komisaris Independen defenitif.
5. Menyetujui pemilihan Calon Direksi dan Calon Anggota Komisaris adalah berdasarkan ketentuan anggaran dasar yang lama.
6. Menyetujui menetapkan Calon Direksi dan Calon Anggota Komisaris PT. Bank Riau Kepri sebagai berikut :

Jabatan	Nama Calon
Komisaris Independen	1. Rita Anugerah 2. Ruslan Malik
Direktur Dana dan Jasa	1. Irfan Budiman 2. Yuharman
Direktur Kredit dan Syariah	1. Syahrul 2. Tengkoe Irawan

7. Menyetujui penyerahan kewenangan kepada Gubernur Riau (setelah pelantikan Gubernur terpilih) untuk melakukan proses seleksi Komisaris Utama dan Direktur Utama PT. Bank Riau Kepri sesuai dengan amanah pasal 2 (dua) Permendagri Nomor 37 tahun 2018, dengan memperhatikan aspirasi dari Gubernur Kepulauan Riau.

Seluruh agenda dan keputusan rapat RUPS Luar Biasa ini selanjutnya dituangkan di dalam Akta Notaris Devi Ananji, SH, M.Kn Nomor : 1156 tanggal 29 November 2018 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri.

Untuk menindaklanjuti Keputusan RUPS Luar Biasa tersebut, Bank telah menuangkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 1157 tanggal 29 November 2018 yang dibuat dihadapan Devi Ananji, SH, M.Kn, Notaris di Kota Batam.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut di atas telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh penegasan pemberitahuan perubahan data perseroan, yaitu :

Nomor dan Tanggal Akta	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan		
	Nomor Pemberitahuan	Tanggal Pemberitahuan	Perihal
Akta Nomor 1157 Tanggal 29 November 2018	AHU-AH.01.03-0279421	22 Desember 2018	Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri

DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diatur bahwa untuk susunan keanggotaan Dewan Komisaris ditetapkan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen yang berdomisili di Pekanbaru sebagai kota kedudukan kantor pusat Bank Riau Kepri.

Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas, sepanjang tahun 2018 anggota Dewan Komisaris Bank yang tercatat di dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Mambang Mit	Komisaris Utama
A. Rivaie Rachman*	Komisaris Independen
Taufiqurrahman	Komisaris Independen

**** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen pada tanggal 28 Desember 2018***

Kriteria Dewan Komisaris

Seluruh pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*).

Untuk persyaratan anggota Dewan Komisaris Bank diatur di dalam perubahan anggaran dasar Bank sebagaimana termuat di dalam Akta RUPS Nomor : 1156 tanggal 29 November 2018 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri.

Independensi Dewan Komisaris

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Tata Kelola yang Baik, bahwa untuk pelaksanaan Tata Kelola yang Baik, Bank perlu melakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan pemangku kepentingan khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen yang membantu tugas Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur mengenai kriteria Komisaris Independen yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

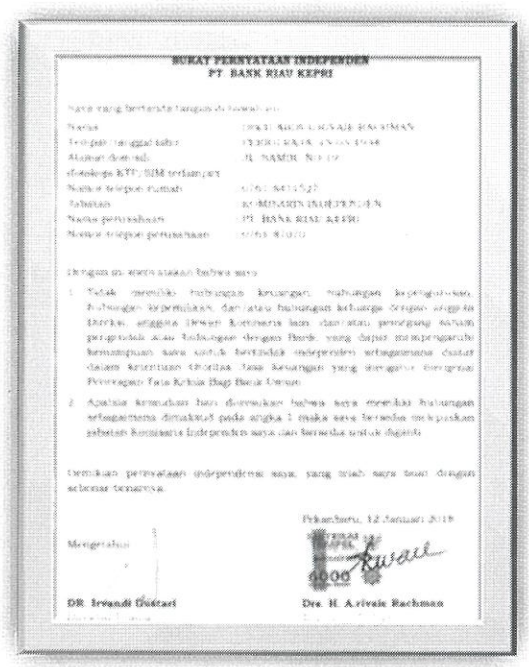
Sehubungan hal tersebut di atas seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan di atas. Selain hal tersebut Komisaris Independen Bank telah membuat surat pernyataan bahwa tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan keluarga dan keuangan anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mambang Mit	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
A. Rivaie Rachman	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Taufiqurrahman	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Masing-masing Komisaris Independen Bank telah membuat Surat Pernyataan Independensi untuk menyatakan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.


SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK RIAU KEPRI


PT. BANK RIAU KEPRI

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur pelaksanaan Tata Kelola, ditetapkan bahwa Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif :

a. pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
b. pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:

a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;

b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsi dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Sesuai hal tersebut di atas, maka untuk jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RANGKAP JABATAN PADA DEWAN KOMISARIS			
Nama	**Jabatan di Bank Riau Kepri**	**Jabatan Pada Perusahaan/Instansi Lain**	**Nama Perusahaan/Instansi Lain**
Mambang Mit	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada
A. Rivaie Rachman	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada
Taufiqurrahman	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada

Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris

Bank mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Riau Kepri maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sepanjang tahun 2018, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain, dengan rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS					
Nama	**Kepemilikan Saham**				
	Bank Riau Kepri	**Bank Lain**	**Lembaga Keuangan Non Bank**	**Perusahaan Lain**	**Keterangan**
Mambang Mit	-	-	-	-	Nihil
A. Rivaie Rachman	-	-	-	-	Nihil
Taufiqurrahman	-	-	-	-	Nihil

Pemenuhan Ketentuan *Fit & Proper Tes*

Seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*). Dalam melaksanakan tugasnya selaku Komisaris Bank, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Anggota Dewan Komisaris	Persetujuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan	Tanggal Persetujuan	Perihal
Mambang Mit	Surat OJK No. SR-24/KO.5411/2015	07 Mei 2015	Pengangkatan Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank Saudara.
A. Rivaie Rachman	Surat BI No. 8/144/GBI/DPIP/Rahasia	04 Desember 2006	Keputusan atas Pencalonan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Riau
	Surat BI No. 13/18/DPB1/APBU/Pbr	14 Maret 2011	Perpanjangan Masa Jabatan Komisaris Bank Saudara
	Surat OJK No. SR-22/KO.5411/2015	21 April 2015	Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris
Taufiqurrahman	Surat OJK No. SR-122/KO.053/2017	22 Juni 2017	Pengangkatan dan Pencatatan Masa Jabatan Komisaris Independen PT. Bank Riau Kepri.

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah setara.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan dari Otoritas Perbankan/ Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
2. Beritikad baik, hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan.
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
5. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi ketentuan peraturan internal Perusahaan.
6. Memberikan nasihat, pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan pengurusan Perseroan.
7. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis Perseroan lainya (KUD/Kebijakan Umum Direksi, *Corporate Plan, Business Plan*) seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.

8. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi.
9. Melakukan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
10. Menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
11. Mengikuti perkembangan kegiatan PT. Bank Riau Kepri baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perseroan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
12. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
13. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
15. Memastikan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan *prudential banking practices*.
16. Memastikan Direksi dan jajarannya dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi menerapkan secara efektivitas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance,* antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.

Wewenang Dewan Komisaris

Wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak, bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris berlaku pula baginya.
6. Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) orang diantara para anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris utusan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan administrasi umum untuk memperlancar tugas Dewan Komisaris.
7. Dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perseroan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite/unit kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, dan wewenang serta pemberhentian komite/unit kerja diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas beban Perseroan.

Kinerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris selalu berpedoman pada Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Tahunan, dan Program Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menggunakan program kerja ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan prinsip Tata Kelola diterapkan dengan baik.

Dalam menjalankan program kerja dimaksud, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Program Kerja Dewan Komisaris selama tahun 2018 menghasilkan beberapa persetujuan, pendapat, tanggapan, dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan persetujuan atas :
   - Piagam Audit Intern Bank.
   - Kajian (*Review)* Kebijakan Perkeditan Bank dan Kebijakan Pembiayaan Syariah.
   - Pendelegasian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direktur Operasional kepada Direktur Utama.
   - Usulan Perubahan SOT Divisi Syariah dan SOT Kantor Cabang Pembantu.
   - *Draft* Perubahan Kebijakan Direksi tentang Pedoman Kerja Direksi.
   - Layanan Perbankan Prioritas (*Priority Banking)* Bank Riau Kepri.
   - Pemberian Kredit Aneka Guna (KAG) kepada Pihak Terkait an. Abdul Ridwan Yazid.
   - Penerbitan Fasilitas Bank Garansi Pelaksanaan an. PT. Sinar Riau Abadi.
   - Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi perihal besaran Remunerasi Pengurus Bank tahun 2018.
   - Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Tahun 2019.
   - *Draft* BPP Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
   - *Revisi* RKAT Bank tahun 2018.

- Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan untuk audit Laporan Keuangan Bank tahun buku 2018.

2. Menyampaikan beberapa laporan yaitu :
   - Laporan Kinerja Bank tahun 2017 kepada Pemegang Saham Pengendali Bank.
   - Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
   - Laporan Pengawasan Tugas Akhir Jabatan Komisaris Independen an. A. Rivaie Rachman.
   - Laporan Evaluasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2017.
   - Laporan Hasil Seleksi Calon Direksi dan Calon Komisaris Bank kepada Pemegang Saham.
3. Memberikan saran terkait :
   - *Risk Appetite Statement* Bank.
   - *Corporate Plan* Bank.
   - Rencana Bisnis Bank.
   - Kondisi likuiditas Bank.
   - Perkembangan bisnis Bank.
   - Penyaluran KUR dan Penerapan PSAK 71.
   - Impelementasi Laku Pandai.
   - Kesiapan implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan PIN Online 6 Digit pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
   - Pengembangan *Mobile Banking* Bank Riau Kepri.
   - Kajian Pembukaan Layanan Samsat.
   - Pemenuhan komitmen Pemeriksaan Umum tahun 2017.
4. Memberikan tanggapan atas :
   - Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2018 – 2020.
   - Rencana Penyaluran Kredit Kantor Cabang Jakarta.
   - Laporan Hasil Pemeriksaan *Market Conduct* Bank Riau Kepri.
   - Hasil Temuan BPK RI Tahun Buku 2014 – 2015.
   - Tindak Lanjut Temuan OJK.
   - Sanksi Kewajiban Membayar dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
   - Sanksi Keterlambatan Pelaporan Realisasi Layanan *Safe Deposit Box* dari OJK.
   - Tindak Lanjut *Prudential Meeting* dengan OJK.
   - Pemenuhan Kewajiban Bank dalam rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional.
   - Rencana Pelaksanaan Produk Kartu Prabayar Uang Elektronik (*e-money*) Bank Riau Kepri *Co-Branding* Bank Mandiri.

- Laporan Pelaksanaan Komitmen Pengembangan Bank.
- Laporan Hasil Audit Umum, Audit Khusus dan Audit Tematik pada beberapa jaringan kantor Bank.
- Laporan Penggunaan Dana Bank.
- Laporan Hasil Kinerja Keuangan Bank.
- Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan.
- Laporan Auditor Independen tentang Sistem Pengendalian Intern.
- Laporan Hasil Audit Kepatuhan.
- Laporan Evaluasi Teknologi Informasi dan *E-Banking*.
- Laporan Tindak Lanjut Audit Umum Perkreditan, Operasional dan IT.
- Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern.

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Tata Kelola Bank, ditegaskan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan pelaksanaannya dapat menggunakan teknologi telekonferensi. Rapat Dewan Komisaris tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan, dan dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan dihadiri oleh anggota Komisaris, atau dengan mengundang Direksi dan/atau pejabat Bank terkait.

Sepanjang tahun 2018 Dewan Komisaris Bank telah melaksanakan 17 (tujuh belas) kali pertemuan/rapat, baik yang diselenggarakan oleh internal Komisaris maupun rapat dengan mengundang Direksi, atau pejabat/pegawai Bank lainnya, yang terlihat pada tabel berikut :

AKTIVITAS RAPAT DEWAN KOMISARIS			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	16 Januari 2018	1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Eka Afriadi 5. Ikhwan
2	31 Januari 2018	1. Publikasi pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan RUPSLB Tahun 2018 sudah diumumkan di media cetak lokal dan nasional (Riau Pos, Batam Pos dan Bisnis Indonesia) 2. Susunan Panitia Pelaksana RUPS	1.H.R. Mambang Mit 2.A. Rivaie Rachman 3.Taufiqurrahman 4.Panitia Pelaksana RUPS Tahunan Tahun

		Tahunan Tahun Buku 2017 dan RUPSLB Tahun 2018 sudah dibentuk berdasarkan Nota Dinas Direksi Nomor : 055/PP.01.04/DIR/ND/2018 tanggal 30 Januari 2018	Buku 2017 dan RUPSLB Tahun 2018
3	2 Februari 2018	1. Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Riau Kepri. 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Masperi,S.Sos., M.Si 5. Mardoni Akrom 6. Almizan 7. Yuharman 8. Terang Dewi Ujung 9. Andres Ilahargon
4	12 Februari 2018	1. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis PT. Bank Riau Kepri semester II Tahun 2017 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman
5	19 Februari 2018	1. Evaluasi kinerja PT. Bank Riau Kepri per Januari 2018 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Irvandi Gustari 5. Eka Afriadi 6. Denny M Akbar 7. Tengkoe Irawan 8. Nusyirwan 9. Rizali Effendi 10. Mukhlis 11. Said Syamsuri 12. Yudhi Aditya Y 13. M Azwizar Hendry 14. Syahrul
6	19 Februari 2018	1. Penetapan Calon Pengurus PT. Bank Riau Kepri 2. Penetapan Calon Dewan Pengawas Syariah 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Eka Afriadi 5. Yuharman
7	26 Maret 2018	1. Evaluasi kinerja PT. Bank Riau Kepri per Februari 2018 2. Pembahasan pertemuan dengan Komisi C DPRD Provinsi Riau 3. Hal-hal yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Irvandi Gustari 5. Eka Afriadi 6. Yuharman 7. Yudhi Aditya Y 8. Wahyudi G 9. Azhar Effendi 10. Andi Mulya 11. Mukhlis 12. Said Syamsuri 13. Ikhwan

8	23 April 2018	1. Evaluasi kinerja PT. Bank Riau Kepri per Maret 2018 2. Persetujuan Kebijakan (review) Perkreditan Bank Riau Kepri 3. Hal-hal yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Eka Afriadi 5. Denny M Akbar 6. Khairul Anwar 7. Azhar Effendi 8. Syahrul 9. Winovri 10. Ikhwan 11. Wahyudi G
9	23 Mei 2018	1. Evaluasi kinerja PT. Bank Riau Kepri per April 2018 2. Hal-hal yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Eka Afriadi 5. Denny M Akbar 6. Khairul Anwar 7. Wahyudi Gustiawan 8. Tengkoe Irawan 9. Syahrul 10. Azhar Effendi
10	19 Juli 2018	1. Evaluasi Kinerja PT. Bank Riau Kepri per Juni 2018 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. Taufiqurrahman 3. Eka Afriadi 4. Khairul Anwar 5. Said Syamsuri 6. Yudhi A.Y 7. Heru Kurniawan 8. Tengkoe Irawan
11	6 Agustus 2018	1. Laporan Hasil Seleksi Calon Direksi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman
12	15 Agustus 2018	1. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis PT. Bank Riau Kepri Semester I Tahun 2018 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. A. RIvaie Rachman 3. Taufiqurrahman
13	4 September 2018	1. Evaluasi Kinerja PT. Bank Riau Kepri per Agustus 2018 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. Irvandi Gustari 3. Eka Afriadi 4. Tengkoe Irawan 5. Yuharman 6. Said Syamsuri 7. Nusyirwan 8. Khairul Anwar 9. Azhar Effendi 10. Wahyudi G 11. Syahrul
14	5 September 2018	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum Terhadap PT. BPD Riau Kepri Tahun 2018	1. Tim Pemeriksa OJK 2. Dewan Komisaris

			3. Direksi 4. Pemimpin Divisi
15	28 September 2018	1. Usulan Perubahan SOT Divisi Syariah 2. Persetujuan Draft Perubahan Keputusan Direksi tentang Pedoman Kerja Direksi 3. Persetujuan Kredit An. Abdul Ridwan Yazid 4. Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Irvandi Gustari 5. Yuharman 6. Trngkoe Irawan 7. Ikhwan 8. Syahrul 9. Zaini Ahmad 10. Yudhi A.Y
16	22 Oktober 2018	1. Evaluasi Kinerja PT. Bank Riau Kepri per September 2018 2. Persetujuan Perubahan SOT Kantor Cabang Pembantu. 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Denny M. Akbar 5. Khairul Anwar 6. Said Syamsuri 7. Mukhlis 8. Yudhi A. Y 9. Syahrul 10. Nusyirwan 11. Tengkoe Irawan
17	26 November 2018	1. Evaluasi Kinerja PT. Bank Riau Kepri per Oktober 2018 2. Pembahasan Rencana Bisnis Bank Riau Kepri Tahun 2019-2021 3. Persetujuan Kajian (review) Kebijakan Pembiayaan Syariah (KPS) 4. Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. H.R. Mambang Mit 2. Taufiqurrahman 3. Irvandi Gustari 4. Eka Afriadi 5. Denny M. Akbar 6. Tengkoe Irawan 7. Khairul Anwar 8. Nusyirwan 9. Mukhlis 10. Zaini Ahmad 11. Syahrul 12. Said Syamsuri

Rapat di atas merupakan rapat Dewan Komisaris yang berdasarkan anggaran dasar Bank telah memenuhi kuorum, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang mengikat.

Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk jika terdapat adanya *dissenting opinion*, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan para peserta rapat, selanjutnya hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan.

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris secara fisik dalam rapat Dewan Komisaris baik yang diselenggarakan internal Dewan Komisaris maupun mengundang Direksi dan pejabat Bank Riau Kepri lainnya, dapat terlihat di dalam tabel berikut :

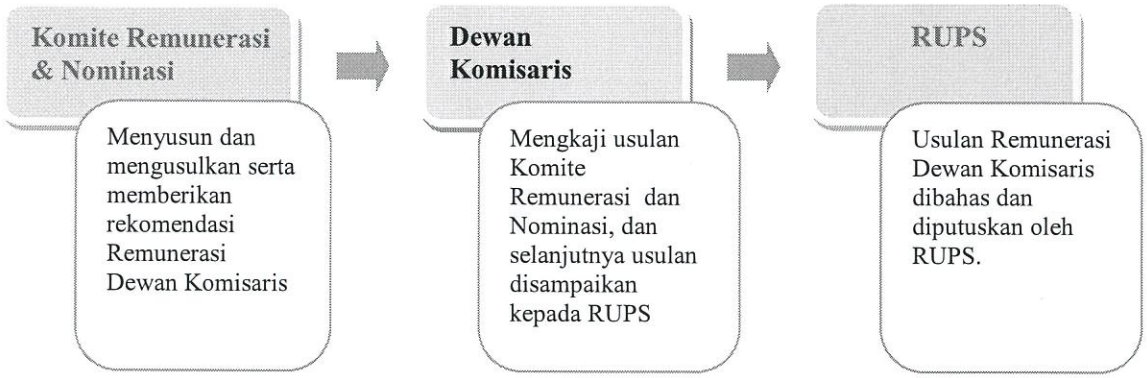
Nama	Jumlah Kehadiran (Total 17 kali Rapat)			% Kehadiran
	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi/Divisi	Rapat Internal Dewan Komisaris	Total Jumlah Kehadiran Rapat Dewan Komisaris	
Mambang Mit	14	3	17	100%
A. Rivaie Rachman*	11	3	14	82%
Taufiqurrahman	15	1	16	94%

**** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen pada tanggal 28 Desember 2018***

Kebijakan dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Bank didasarkan pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, Anggaran Dasar Bank, dan Keputusan Direksi Nomor 019/KEPDIR/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Remunerasi Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Keputusan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS, dengan mekanisme sebagai berikut :



Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2018 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Dewan Komisaris adalah sebesar Rp12.971.795.907,-.

Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2018 terlihat dalam tabel berikut :

Jenis Penerimaan	Jumlah Komisaris	Nominal (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	3	12.815.271.129,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dsb)	3	156.524.778,-
Jumlah Penerimaan		**12.971.795.907,-**

Rincian Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2018 terlihat dalam tabel berikut :

No.	Jenis Penerimaan	Jumlah Remunerasi (Rp)
1	Gaji	2.184.000.000
2	Pakaian Dinas	82.170.000
3	Cuti	-
4	THR	546.000.000
5	Tunjangan Perumahan	112.432.500
6	Tunjangan Listrik	86.967.349
7	Tunjangan Telepon	32.748.363
8	Tunjangan Kesehatan	36.809.066
9	Tunjangan Hari Tua	433.352.349
10	Tunjangan Purna Bakti Jabatan	2.326.487.415
11	Tunjangan Pajak	2.257.303.796
12	Tantiem	4.873.525.068
Total		**12.971.795.907**

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi selama tahun 2018 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, terlihat dalam tabel di bawah :

Kelompok Nominal Remunerasi dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	3
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	-
Total	**3**

Program Orientasi Dewan Komisaris

Dengan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham, maka keberadaan Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena antar Anggota Dewan Komisaris tidak saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Program orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan. Program orientasi dapat juga berupa program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Prosedur Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Program Orientasi mengenai Bank wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru pertama menjabat.
2. Tanggung jawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk.
3. Materi yang diberikan pada Program Orientasi antara lain meliputi :

a. Gambaran mengenai Bank yang berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.

b. Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik oleh Bank.

c. Tanggung jawab hukum Anggota Dewan Komisaris.

d. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

e. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

f. Sebagai *team building,* yaitu bahwa seluruh Anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Dewan Komisaris.

Program Pelatihan dan Seminar Dewan Komisaris

Pada tahun 2018 Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/*workshop* baik yang diselenggarakan oleh pihak internal, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun dari lembaga pelatihan yang ada di Indonesia.

Nama	Jenis Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan
Mambang Mit (Komisaris Utama)	*Workshop* Desentralisasi Keuangan Daerah dan Politik APBN 2018	FKDKP dan The Consumer Banking School	11-01-2018
	Workshop & Refreshment Manajemen Risiko "Tantangan ke depan: Mitigasi Risiko Strategis Perbankan Syariah"	LPPI - ICDIF	09-03-2018
	Sosialisasi PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD	Asbanda	18-04-2018
	Seminar "Peran Dewan Komisaris dalam Penyelesaian Kasus-kasus Hukum yang Terjadi di BPDSI"	FKDKP - BPDSI	07-05-2018
	Workshop Revitalisasi Penerapan Tata Kelola dan Pencegahan *Fraud* di Perbankan (Bagaimana Bank-bank Menerapkan Tata Kelola sesuai POJK 55/POJK.03/2016	The Consumer Banking School	08-05-2018
	Seminar Peran Aktif Kepatuhan Perbankan Menjaga Stabilitas Melalui Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh FKDKP Tanggal 26 Juni 2018 di Jakarta	FKDKP	26-06-2018

	Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simped	Asbanda	10-08-2018
	Seminar Nasional "Perilaku Pasar Keuangan Syariah di Tengah Gejala *Post*-Islamisme"	Infobank	26-09-2018
	Workshop Desentralisasi Keuangan Daerah dan Politik APBN 2018	FKDKP dan The Consumer Banking School	11-01-2018
A. Rivaie Rachman (Komisaris Independen)	*Workshop & Refreshment* Manajemen Risiko "Tantangan ke depan: Mitigasi Risiko Strategis Perbankan Syariah"	LPPI - ICDIF	09-03-2018
	Seminar "Peran Dewan Komisaris dalam Penyelesaian Kasus-kasus Hukum yang Terjadi di BPDSI"	FDKP - BPDSI	07-05-2018
	Workshop Revitalisasi Penerapan Tata Kelola dan Pencegahan *Fraud* di Perbankan (Bagaimana Bank-bank Menerapkan Tata Kelola sesuai POJK 55/POJK.03/2016	The Consumer Banking School	08-05-2018
	Seminar Peran Aktif Kepatuhan Perbankan Menjaga Stabilitas Melalui Pencegahan Pendanaan Terorisme	FDKP	26-06-2018
	Workshop Fit & Proper Test Komisaris, Direktur, Dewan Pengawas Syariah	Risk Management Guard (RMG)	26-07-2018
	Seminar Nasional *Journey to Bank as a Platform and New Business Model* - Menangkap Peluang di Tengah Ketidakpastian Global dan Tekanan Nilai Tukar Serta Suku Bunga Tinggi	The Consumer Banking School	22-11-2018
Taufiqurrahman (Komisaris Independen)	*Workshop* Desentralisasi Keuangan Daerah dan Politik APBN 2018	FKDKP dan The Consumer Banking School	11-01-2018
	Workshop & Refreshment Manajemen Risiko "Tantangan ke depan: Mitigasi Risiko Strategis Perbankan Syariah"	LPPI - ICDIF	09-03-2018
	Workshop Antisipasi Dini Kejahatan (Tindak Pidana) Korporas	The Consumer Banking School	18-04-2018
	Seminar "Peran Dewan Komisaris dalam Penyelesaian Kasus-kasus Hukum yang Terjadi di BPDSI"	FDKP - BPDSI	07-05-2018

	Workshop Revitalisasi Penerapan Tata Kelola dan Pencegahan *Fraud* di Perbankan (Bagaimana Bank-bank Menerapkan Tata Kelola sesuai POJK 55/POJK.03/2016	The Consumer Banking School	08-05-2018
	Seminar Peran Aktif Kepatuhan Perbankan Menjaga Stabilitas Melalui Pencegahan Pendanaan Terorisme	FDKP	26-06-2018
	Workshop Good Corporate Governance BPD Se Sumatera	Asbanda	13-09-2018
	Wawancara Visa Terkait *International Risk Management Refreshment Program for Executive*	Schengen Visa Application Center	27-09-2018
	International Risk Management & Treasury Dealer Refreshment Program for Executive	Ikatan Bankir Indonesia dan UGM	06-10-2018
	Workshop Connecting The Dot Between Compliance, Business, and Risk Management - Membangun Sinergi, Strategi Penguatan *Three Lines of Defence* dan Mengukur *Risk Maturity Level*	Risk Management Guard (RMG)	22-11-2018

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris selain berpedoman pada anggaran dasar Bank dan BPP Pelaksanaan Tata Kelola Bank, juga mengacu kepada Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Pedoman Kerja Dewan Komisaris berisi tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dengan organ kelengkapannya, dan dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Bank.

Pedoman kerja Dewan Komisaris diatur di dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014, yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan, meliputi :
   a. Dasar Hukum
   b. Definisi dan istilah yang digunakan
2. Komisaris, meliputi :
   a. Visi, Misi dan Tujuan
   b. Fungsi
   c. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris
   d. Etika Jabatan
   e. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

f. Waktu kerja

g. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris berkaitan dengan Anggaran Dasar

h. Rapat Dewan Komisaris

i. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

j. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

3. Organ-organ di bawah Dewan Komisaris

a. Staf Ahli dan Komite-Komite

b. Sekretariat Dewan Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Penentuan Komisaris Independen Bank dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

b. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir c tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.

e. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

f. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

g. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

h. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

i. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang. Tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lain yang terkait dengan Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Direksi

Kriteria atau persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Bank pada prinsipnya diatur di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pada Bank Riau Kepri, kriteria atau persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi telah diatur di dalam perubahan anggaran dasar Bank sebagaimana termuat di dalam Akta RUPS Nomor : 1156 tanggal 29 November 2018 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri.

Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus serta persyaratan lainnya dan beberapa syarat tambahan bagi Direktur Kepatuhan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Komposisi Direksi

Pengangkatan anggota Direksi Bank dilakukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sepanjang tahun 2018, susunan pengurus Bank (Direksi) adalah sebagai berikut :

Nama Direksi	Jabatan	Periode Jabatan	
		Diangkat	Berakhir
Irvandi Gustari	Direktur Utama	2015	2019
Denny Muliya Akbar	Direktur Operasional	2016	2020
Eka Afriadi*	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	2017	2021

* *Diperpanjang masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dengan periode masa jabatan 05 Juli 2017 s.d. 04 Juli 2021*

Uji Kelayakan Dan Kepatutan Direksi

Setiap anggota Direksi Bank memiliki pengalaman dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank, hal ini mengingat karena anggota Direksi Bank merupakan mantan dan pernah menjabat sebagai pejabat eksekutif Bank. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan memenuhi persyaratan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and profer test)* Direksi.

Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus uji kelayakan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana terungkap pada tabel di bawah ini :

PERSETUJUAN PENGANGKATAN DIREKSI BANK			
Nama Direksi	**Jabatan**	**Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan**	
		Nomor Surat	**Tanggal**
Irvandi Gustari	Direktur Utama	SR-24/KO.5411/2015	07 Mei 2015
Denny Muliya Akbar	Direktur Operasional	SR-36/KO.54/2016	23 Februari 2016
Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	SR-144/KO.053/2017	11 Juli 2017

Tugas dan Tanggung jawab Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Di samping hal tersebut Direksi juga melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Untuk memaksimalkan kinerja Direksi dalam rangka pengurusan Bank, diaturlah pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi yang tertuang di dalam surat Keputusan Direksi Nomor 111/KEPDIR/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pedoman Kerja Direksi. Pedoman Kerja Direksi ini disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum perbankan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank, keputusan-keputusan RUPS, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran (*fairness*).

Sebagai bagian implementasi pelaksanaan tata kelola yang baik, Keputusan Direksi Nomor 111/KEPDIR/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pedoman Kerja Direksi yang di dalamnya mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi Bank telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Bank sebagaimana tertuang di dalam Surat Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 130/DK-BRK/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Persetujuan Draft Keputusan Direksi tentang Pedoman Kerja Direksi.

Tugas dan Tanggung jawab Masing-masing Direksi

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi Bank diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 111/KEPDIR/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pedoman Kerja Direksi, yaitu sebagai berikut :

1. Tugas Direktur Utama

a. Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan.

b. Bersama-sama dengan Komisaris Utama menandatangani surat saham dan surat kolektif saham.

c. Mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

d. Menjalin hubungan dengan pihak luar antara lain dengan Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank-Bank dan lembaga lainnya.

e. Bertanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas dan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.

f. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank.

g. Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Audit Internal.

h. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Bank secara menyeluruh.

i. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Bank.

j. Menyiapkan Rencana Kerja Bank.

k. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Bank ditutup.

l. Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur.

m. Direktur Utama berwenang mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

n. Direktur Utama berwenang melakukan tindakan korektif dan/atau instruktif atas kebijakan yang telah diputuskan oleh Direktur yang menurut penilaian Direktur Utama menyimpang dari kebijakan Bank.

2. Tugas Direktur Dana dan Jasa

a. Direktur Dana & Jasa dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

b. Direktur Dana & Jasa bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.

c. Direktur Dana & Jasa menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.

3. Tugas Direktur Kredit dan Syariah

a. Direktur Kredit & Syariah dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

b. Direktur Kredit & Syariah bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.

c. Direktur Kredit & Syariah menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.

4. Tugas Direktur Operasional

a. Direktur Operasional dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

b. Direktur Operasional bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.

c. Direktur Operasional menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.

5. Tugas Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

a. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

b. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.

c. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.

d. Di samping melaksanakan hal-hal yang telah disebutkan di atas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko berpedoman kepada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, antara lain yaitu :

- Mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi semua risiko kepatuhan Bank, sesuai Pedoman Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Bank;
- Melakukan pengujian atas rancangan dan perubahan pedoman kerja pada Direktur lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan;
- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh aktivitas Bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya;

- Memastikan penerapan prinsip Tata Kelola yang Bail telah berjalan sesuai dengan ketentuan di seluruh tingkat organisasi.
- Memastikan penerapan prinsip kehati-hatian seluruh aktivitas operasional Bank telah sesuai dengan Ketentuan Bank dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
- Melaporkan kepada pihak otoritas perbankan apabila terdapat pelanggaran kepatuhan.

Independensi Direksi

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan keluarga dan keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Irvandi Gustari	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Denny Muliya Akbar	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Eka Afriadi	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Rangkap Jabatan Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, lembaga keuangan non Bank atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Jabatan rangkap Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

RANGKAP JABATAN PADA DIREKSI			
Nama Direksi	**Jabatan**	**Pada Bank Lain**	**Perusahaan Lain**
Irvandi Gustari	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak ada
Denny Muliya Akbar	Direktur Operasional	Tidak ada	Tidak ada
Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Tidak ada	Tidak ada

Kepemilikan Saham Direksi

Bank mewajibkan anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Riau Kepri maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Untuk periode 31 Desember 2018, seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Rincian Kepemilikan Saham Direksi Bank adalah sebagai berikut :

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI					
Nama	Kepemilikan Saham				
	Bank Riau Kepri	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain	Keterangan
Irvandi Gustari	-	-	-	-	Nihil
Denny Muliya Akbar	-	-	-	-	Nihil
Eka Afriadi	-	-	-	-	Nihil

Rapat Direksi

Di dalam Kebijakan Pedoman Tata Kelola Bank Riau Kepri dan Pedoman Kerja Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu dan diselenggarakan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) bulan.

Direksi dapat mengadakan rapat di luar jadwal tersebut di atas berdasarkan permintaan tertulis :

1. Seorang atau lebih Direktur.
2. Permintaan tertulis seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris.
3. Permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

Sepanjang tahun 2018 Direksi Bank telah menyelenggarakan rapat sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, baik rapat internal Direksi, rapat Direksi dengan Komisaris maupun rapat Direksi dengan unit kerja terkait (rapat koordinasi). Rapat Direksi berfungsi untuk menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis.

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI			
No	Tanggal	Materi Rapat	Peserta
1	9 Januari 2018	Progres Kinerja	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi
2	12 Januari 2018	Pembahasan Gap Kebutuhan dan Program Pengembangan SDM	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Yuharman 5. Ikhwan
3	13 Februari 2108	Rapat Audiensi Spin Off UUS BRK bersama Direksi oleh konsultan dari LPPI Jakarta	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Syahrul 5. Andi Mulya 6. Ikhwan 7. Heru Kurniawan 8. Yuharman 9. Edy Setiadi 10. Edi Setiawan

			11. Helda Rahmi Sina 12. Irianto
4	22 Mei 2018	Membahas Proyeksi Laba Mei & Juni 2018	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M Akbar 4. Tengkoe Irawan 5. Yuharman 6. Ahmad Zahidi
5	4 Juni 2018	Pembahasan Surat OJK Terkait Penyaluran Kredit Cabang Jakarta dan Surat OJK Terkait RBB 218-2020	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Tengkoe Irawan 4. Ikhwan 5. Hendra Buana 6. Heru Kurniawan 7. Azhar Effendi
6	2 Juli 2018	Rapat Evaluasi Kinerja Juni 2018	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Tengkoe Irawan 5. Azhar Effendi 6. Nusyirwan 7. Khairul Anwar 8. Syahrul 9. Zaini Ahmad 10. Wahyudi Gustiawan 11. Yudhi Aditya Yudhana 12. Said Syamsuri 13. Mukhlis 14. Seluruh Kepala Cabang/Capem
7	5 Juli 2018	Pembahasan Likuiditas dan Kredit	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Syahrul 5. Khairul Anwar 6. Nusyirwan 7. Zaini Ahmad 8. Yudhi A 9. Heru Kurniawan
8	6 Juli 2018	Pembahasan Pengalihan Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direktur Operasional Dan Pejabat Bank Riau Kepri Yang Akan Melaksanakan Cuti Ibadah Haji	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Yuharman 5. Ahmad Zahidi
9	13 Juli 2018	Mitigasi Risiko	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi

			3. Azhar Effendi 4. Ikhwan 5. Heru Kurniawan 6. Hendra Buana 7. Tengkoe Irawan
10	8 Agustus 2018	Tindak Lan jut Temuan OJK Pemeriksaan Tahun 2017	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Ikhwan 4. Hendra Buana
11	16 Agustus 2018	Rapat Perubahan SOT Divisi Syariah Tahun 2018	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Syahrul 4. Tengkoe Irawan 5. Noki Syafrialdi
12	18 September 2018	Rapat ALCO	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Syahrul 4. Tengkoe Irawan 5. Heru Kurniawan 6. Nusyirwan 7. Wahyudi Gustiawan 8. Azhar Effendi
13	25 September 2018	Pembahasan Proyeksi Laba	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Yuharman 5. Tengkoe Irawan 6. Andi Mulya 7. Yudhi A.Y 8. Azhar Effendi
14	1 Oktober 2018	Rapat Evaluasi Kinerja	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Tengkoe Irawan 5. Aulia Farkhan 6. Nusyirwan
15	2 Oktober 2018	Rapat Klasifikasi Kantor Bank	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Tengkoe Irawan 4. Ikhwan 5. Andi Mulya 6. Azhar Effendi 7. Wan Mukhlis 8. Yuharman
16	3 Oktober 2018	Rapat Evaluasi Kinerja	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Tengkoe Irawan

			5. Seluruh Pemimpin Cabang/Capem/Kedai
17	5 Oktober 2018	Rapat Pembahasan Usulan Permohonan Kredit dengan Agunan Tunai (cash collateral credit) An. MNC Kapital	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Khairul Anwar 5. Arifan Dinata
18	9 Oktober 2018	Penyampaian Temuan Signifikan Audit Umum Cabang Batam Tahun 2018	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Hendra Buana 5. Vauli Putra Yandi
19	11 Oktober 2018	Permintaan Komitmen Penyelesaian Atas Temuan Perkreditan yang Signifikan Hasil Audit Cabang Batam Tahun 2018	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Hendra Buana 5. Khairul Anwar 6. Burhan 7. Antoni S
20	29 Oktober 2018	Rapat ALCO	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Yudhi AY 4. Heru Kurniawan 5. Khairul A 6. Wahyudi G 7. As'ari 8. Syahrul
21	29 Oktober 2018	Rapat Pembahasan tentang Kredit PT. MNC Kapital Indonesia	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M.Akbar 3. Khairul Anwar 4. Arifan Dinata 5. Syahrul
22	30 Oktober 2018	Rapat PH Kredit periode Oktober Tahun 2018	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Tengkoe Irawan 4. Yuhaman 5. Said Syamsuri 6. Wahyudi G 7. Andi Mulya
23	6 - 7 November 2018	Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Unit (RKAU) Divisi/Desk/Unit/Tim Task Force	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Seluruh Pemimpin Divisi/Desk/Unit/Tim Task Force
24	10 Desember 2018	Pembahasan Reposisi Jabatan Strategik Untuk Akselerasi Kinerja Tahun 2019	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Yuharman 5. Tengkoe Irawan

Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk *dissenting opinion*, serta dibagikan kepada seluruh anggota Direksi dan pihak terkait, dan selanjutnya hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan.

Tingkat kehadiran anggota Direksi secara fisik dalam rapat Direksi baik yang diselenggarakan internal Direksi maupun mengundang unit kerja terkait dan undangan Dewan Komisaris, dapat terlihat di dalam tabel berikut :

No	Direksi	Jabatan	Kehadiran (dari total 24 kali rapat)		
			Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
1	Irvandi Gustari	Direktur Utama	24	24	100 %
2	Denny Muliya Akbar	Direktur Operasional	24	17	71 %
3	Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	24	21	86 %

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi Bank dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*self assessment)* Tata Kelola yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure, governance process*, dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

Penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Parameter penilaian kinerja Direksi meliputi prinsip-prinsip TARIF dalam Tata Kelola yang Baik terkait keseluruhan fungsi dalam mengelola Bank Riau Kepri.

Selain melalui penilaian sendiri (*self assessment)*, penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui pertanggungjawaban laporan tahunan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini terlihat pada saat pelaksanaan RUPS tahunan tahun 2018 dimana pemegang saham (RUPS) menyetujui laporan tahunan tahun buku 2017 yaitu laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan keuangan perseroan tahun buku 2017 dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017.

Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Direksi

Sepanjang tahun 2018 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Direksi adalah sebesar Rp20.291.744.231,-

Jumlah di atas merupakan remunerasi yang diberikan kepada Direksi untuk periode Januari s/d Desember 2018.

Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2018, sebagai berikut :

Jenis Penerimaan	Jumlah Direksi	Nominal (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	3	19.902.141.070,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dsb)	3	389.603.161,-
Jumlah Penerimaan		**20.291.744.231,-**

Rincian Remunerasi Direksi selama tahun 2018 terlihat dalam tabel berikut :

No.	Jenis Penerimaan	Jumlah Remunerasi
1	Gaji	3.240.000.000
2	Pakaian Dinas	98.010.000
3	Cuti	270.000.000
4	THR	810.000.000
5	Tunjangan Perumahan	83.362.500
6	Tunjangan Listrik	115.487.462
7	Tunjangan Telepon	142.393.174
8	Tunjangan Kesehatan	131.722.525
9	Tunjangan Hari Tua	973.273.011
10	Tunjangan Purna Bakti Jabatan	4.116.465.745
11	Tunjangan Pajak	3.824.683.500
12	Tantiem	6.486.346.314
Total		**20.291.744.231**

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi selama tahun 2018 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, terlihat dalam tabel di bawah ini :

Kelompok Nominal Remunerasi dalam 1 tahun	Jumlah Direksi
Di atas Rp 2 miliar	3
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	-
Total	**3**

Program Pelatihan dan Seminar Direksi

Sepanjang tahun 2018, Direksi Bank telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/*workshop* yang diselenggarakan oleh pihak internal dan eksternal yaitu BI/OJK dan dari lembaga pelatihan yang ada di Indonesia, antara lain :

Nama	Materi Pelatihan	Penyelenggara Pelatihan/Seminar	Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Irvandi Gustari	Sosialisasi PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD	Asbanda	Jakarta, 18 April 2018
	Workshop Penerapan *Financial Technology, Tresaury, Liquidity Gap Strategy,* Teknologi Informasi, dan *Fraud* kepada Industri Perbankan	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta, 24 April 2018
	National Seminar Entrepreneurship in Indonesia 4.0	SB – IPB	Jakarta, 28 Juli 2018
	Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda	Asbanda	Lampung, 10 Agustus 2018
	High Level Policy Talk "The Future of Finance" dan *International Research Seminar "Financial Sector Development and the Future of Finance"*	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta, 12 Oktober 2018
Denny Muliya Akbar	Sosialisasi Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (KASPI)	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia	Jakarta, 24 Januari 2018
	Workshop "Arah Kebijakan Perkembangan *Digital Banking* di Indonesia"	Asbanda	Jakarta, 08 Februari 2018
	Sosialisasi Rancangan Peraturan BPKH tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Pengelolaan Rekening Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH)	Badan Pengelola Keuangan Haji	Jakarta, 14 Februari 2018
	Workshop Kupas Tuntas Kajian Dampak Penerapan PSAK 71 (Akuntansi Instrumen Keuangan)	Awesome Consulting	Jakarta, 19 Februari 2018
	Sosialisasi Peran Dukungan Pemerintah dan Penyedia Pembiayaan Perumahan dalam Bidang Perumahan di Daerah	PT. SMF	Medan, 05 April 2018
	Training Syndicate Loan : Understanding The Syndication Process and Handling from A to Z	One Point	Jakarta, 18 April 2018
	Digital Reinvention Roundtable for Financial Services Industry	IBM Indonesia	Jakarta, 15 Mei 2018
	Workshop Konvensi Nasional	Otoritas Jasa	Jakarta, 18

	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Tresuri	Keuangan	Oktober 2018
	Workshop Akselerasi Pertumbuhan BPD melalui Penawaran Umum	Indonesia Stock Exchange	Jakarta, 26 Oktober 2018
	Workshop Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun pada BPDSI	Asbanda	Bukittinggi, 15 November 2018
	Workshop Penajaman Ulang Tuntutan OJK kepada Komite Audit & Komisaris - Pencegahan Management melakukan *Fraud* (Kasus SNP) dan *Review* Pedoman Kerja Komite Audit berdasarkan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP	Risk Management Guard (RMG)	Jakarta, 22 November 2018
	Digital Economic Forum "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dengan Memaksimalkan Sinergi Sektor Perbankan Keuangan, Infrastruktur, Teknologi dan Umum"	Bisnis Indonesia & Kim Communication	Jakarta, 11 Desember 2018
	Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Jakarta, 18 Desember 2018
Eka Afriadi	Training *"Certified Risk Governance Professional"* (CRGP)	PT. Risk Advisory & Performance	Pangkal Pinang, 21 Maret 2018
	Seminar FKDKP *Batch* 1 Tahun 2018	FKDKP	Jakarta, 26 Juni 2018
	Sosialisasi Ratio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau pembiayaan Kendaraan Bermotor Tahun 2018	Bank Indonesia	Jakarta, 20 Juli 2018
	Fit & Proper Test Komisaris, Direktur, Dewan Pengawas Syariah	Risk Management Guard (RMG)	Jakarta, 26 Juli 2018
	Sosialisasi Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun dan Peraturan OJK Nomor	Otoritas Jasa Keuangan	Medan, 3 Agustus 2018

	8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun		
	Workshop Good Corporate Governance BPD Se Sumatera	Asbanda	Batam, 13 September 2018
	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta, 29 September 2018

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 111/KEPDIR/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pedoman Kerja Direksi, yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan, meliputi :
   a. Dasar Hukum
   b. Istilah Yang Digunakan
2. Direksi, meliputi :
   a. Visi Dan Misi
   b. Tujuan
   c. Fungsi
   d. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi
   e. Persyaratan Untuk Menjadi Direksi
   f. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
   g. Masa Jabatan
   h. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
   i. Etika Kerja dan Jabatan
   j. Waktu Kerja
   k. Tugas dan Tanggung jawab
   l. Hak dan Kewenangan
   m. Rapat Direksi
   n. Pembagian Tugas Antar Direksi
   o. Pendelegasian Wewenang Antar Direksi
   p. Komite-komite Direksi
   q. Hubungan Kerja Antara Direksi dan Dewan Komisaris
   r. Penggunaan Saran Profesional

RASIO GAJI DAN KOMPOSISI PEGAWAI

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk perbandingan/ratio gaji antara gaji Dewan Komisaris tertinggi dengan yang terendah, gaji Direksi tertinggi dengan yang terendah, gaji pegawai tertinggi dengan yang terendah, dan antara gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai yang tertinggi sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jabatan	Gaji (Rp)		Rasio Perbandingan (%)
		Tertinggi	Terendah	
1	Gaji Dewan Komisaris	65.000.000,-	58.500.000,-	90
2	Gaji Direksi	100.000.000,-	85.000.000,-	85
3	Gaji Pegawai Tetap	32.200.000,-	3.500.000,-	10,87
4	Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tetap Tertinggi	100.000.000,-	32.200.000,-	32,20

Komposisi Pegawai

Sampai dengan Desember 2018 jumlah pegawai Bank Riau Kepri (pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap) berjumlah 1.989 orang.

Komposisi pegawai sebagaimana diuraikan di bawah ini merupakan uraian komposisi pegawai Bank Riau Kepri dengan status pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

1. Komposisi Pegawai Tetap (PT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan tingkat usia pada tahun 2018

No	Usia Pegawai	(PT)	(PTT)	Jumlah
1	50 – 55	65	9	74
2	40 – 49	256	51	307
3	30 – 39	677	225	902
4	23 – 29	417	278	695
5	≤ 23	0	11	11
Total		**1.415**	**574**	**1.989**

2. Komposisi Pegawai Tetap berdasarkan jabatan pada tahun 2018

No	Jabatan	Jumlah
1	Pemimpin Divisi	19
2	Pemimpin Cabang Konvensional	18
3	Pemimpin Cabang Syariah	2
4	Pemimpin Setingkat Pincab	2
5	Pemimpin Bagian Kantor Pusat	39
6	Pemimpin Cabang Pembantu	43
7	Pemimpin Setingkat Pincapem	5
8	Pemimpin Seksi Setingkat	370
9	Pegawai MPP (Masa Persiapan Pensiun)	5

10	Pelaksana	871
11	Supir	15
12	Satpam	26
Total		**1.415**

3. Komposisi Pegawai Tidak Tetap berdasarkan jabatan pada tahun 2018

No	Jabatan	Jumlah
1	Administrasi	21
2	CS/Teller/RO/FO	228
3	Supir	48
4	Satpam	194
5	Petugas Ekspedisi	4
6	Pembantu Rumah Tangga	1
7	Petugas Jaga Malam	8
8	Cleaning Service	70
Total		**574**

4. Komposisi Pegawai (tetap dan tidak tetap) berdasarkan pendidikan pada tahun 2018

No	Keterangan	Jumlah
1	S3	2
2	S2	85
3	S1	1.320
4	D4	3
5	D3	244
6	D1	1
7	SMA	320
8	SMP	13
9	SD	1
Total		**1.989**

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Struktur organisasi tersebut dibentuk sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

KOMITE AUDIT

Susunan Anggota Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang

Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Untuk komposisi Komite Audit sepanjang tahun 2018 berdasarkan SK Direksi Nomor 037A/KEPDIR/2017 tanggal 08 Mei 2017 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Susunan Keanggotaan Komite Audit		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
Taufiqurrahman	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Mambang Mit	Anggota	Komisaris Utama
Fahmi Oemar	Anggota	Pihak Independen
Indarti	Anggota	Pihak Independen

Keahlian dan Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit Bank terdiri dari Komisaris independen dan pihak independen. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Anggota Komite Audit Bank telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Riau Kepri dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas mengevaluasi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus serta memberikan pendapat secara profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dibidang laporan keuangan dari Direksi, auditor internal, auditor eksternal, serta mereview laporan ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.

Diantara tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang diatur di dalam SOT Bank Riau Kepri antara lain adalah :

1. Menindaklanjuti hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Komisaris.
2. Melaporkan pelaksanaan dari pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada OJK setiap semester.
3. Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh SKAI dan meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.
4. Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta instansi lain yang berkepentingan dilakukan dengan benar dan tepat waktu dan

memastikan bahwa Bank mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin SKAI oleh Direksi dan dilaporan kepada OJK.
6. Memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai penunjukkan akuntan publik, serta melakukan evaluasi terhadap kandidat minimal 3 (tiga) tahun sekali untuk menjaga kemandirian dari akuntan publik yang ditunjuk.
7. Menyampaikan hasil pemeriksaan yang bersifat material dan rekomendasi perbaikan atau saran yang bersifat material ke Bursa Efek dan tersedia di kantor perusahaan untuk dibaca oleh Pemegang Saham.
8. Menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan serta menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI, apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan atau penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
9. Memastikan bahwa manajemen menjamin baik auditor ekstern maupun intern dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku.
10. Mengevaluasi kebijakan pengendalian risiko.
11. Mengevaluasi masalah-masalah pajak dan hukum yang membutuhkan penanganan khusus.
12. Melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Bank.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Komite Audit

1. Rencana Kegiatan/Program Kerja Komite Audit

Untuk tahun 2018 Komite Audit telah menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut :

a. Melakukan rapat rutin Komite Audit untuk membahas Laporan Hasil Audit Umum.
b. Melakukan *review* realisasi Rencana Kerja Audit Tahunan SKAI.
c. Melakukan rapat Komite Audit dengan Auditor Indenden/KAP.
d. Melakukan rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
e. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
f. Melakukan kunjungan pengawasan ke Kantor Cabang.
g. Melakukan rapat Komite Audit dengan Divisi dan unit kerja lainnya.
h. Melakukan pembahasan laporan keuangan dan laporan realisasi Rencana Bisnis Bank serta laporan kinerja Bank.
i. Membuat laporan tahunan Komite Audit.

2. Realisasi Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2018 Komite Audit telah melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana kerja dan tugas serta tanggung jawabnya, meliputi sebagai berikut :

a. Melakukan rapat rutin Komite Audit untuk membahas Laporan Hasil Audit Umum.

b. Melakukan *review* realisasi Rencana Kerja Audit Tahunan SKAI.

c. Melakukan rapat Komite Audit dengan Auditor Independen/KAP.

d. Melakukan rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

e. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

f. Melakukan kunjungan pengawasan ke Kantor Cabang Jakarta dan Cabang Batam.

g. Melakukan rapat Komite Audit dengan Divisi dan unit kerja lainnya.

h. Melakukan pembahasan laporan keuangan dan laporan realisasi Rencana Bisnis Bank serta laporan kinerja Bank.

i. Membuat laporan tahunan Komite Audit.

Aktivitas Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut di atas, sepanjang tahun 2018 Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran–saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank di dalam 24 (dua puluh empat) kali rapat/pertemuan.

Rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit secara internal sebanyak 16 (enam belas) kali rapat/pembahasan, yaitu sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE AUDIT			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	18 Januari 2018	- Membahas perkembangan Audit Tahun Buku 2017 - Mengefektifkan fungsi Komite Audit - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
2	8 Februari 2018	- Membahas tentang Daftar Kollektibitas Pinjaman PT.Bank Riau Kepri per 7 Februari 2018. - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
3	19 Maret 2018	- Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri Bulan Januari 2018. - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
4	21 Maret 2018	- Membahas Laporan SKAI mengenai Audit Khusus Capem Dalu-Dalu, Capem	1. Taufiqurrahman

		Syariah Duri dan Capem Sorek. - Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
5	04 April 2018	- Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Februari 2018. - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
6	25 April 2018	- Membahas Laporan Kinerja PT Bank Riau Kepri bulan Maret 2018. - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
7	4 Juni 2018	- Membahas mengenai "Penugasan Audit Khusus" oleh Dirut PT Bank Riau Kepri kepada Pemimimpin Cabang Utama PT Bank Riau Kepri. - Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
8	25 Juni 2018	- Membahas tentang Laporan Kinerja PT Bank Riau Kepri bulan April 2018. - Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
9	9 Juli 2018	- Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri Bulan Mei 2018 - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
10	1 Agustus 2018	- Membahas Laporan Hasil Audit Umum-Divisi Teknologi dan Sistem Informasi - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
11	16 Agustus 2018	- Membahas Tentang Proses Tahapan Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) Yang Akan Melakukan Audit Umum Untuk Tahun Buku 2018 - Membahas Hal-Hal Lain Yang Dianggap Perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
12	5 September 2018	- Membahas Hasil Exit Meeting LHP OJK per 31 Mei 2018 - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
13	2 Oktober 2018	- Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri Bulan Agustus 2018 - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
14	16 Oktober 2018	- Membahas tentang penawaran jasa audit KAP untuk audit tahun buku 2018 - Membahas tentang perpanjangan waktu dalam hal memberikan kesempatan kepada	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
15	26 Oktober 2018	- Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri Bulan September 2018	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit

		- Hal-hal lain yang dianggap perlu	3. Fahmi Oemar 4. Indarti
16	27 Nopember 2018	- Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri Bulan Oktober 2018 - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti

Untuk rapat koordinasi Komite Audit dengan unit kerja Bank lainnya dan pihak eksternal (KAP) telah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali rapat/pembahasan, yaitu sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE AUDIT			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	18 Januari 2018	- Membahas progress audit KAP Tahun Buku 2017 - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Hendra Buana
2	19 Februari 2018	- Membahas Hasil Audit KAP atas laporan keuangan Tahun Buku 2017 - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Irvandi Gustari 4. Fahmi Oemar 5. Indarti
3	13 Maret 2018	- Membahas tentang Laporan Tindak Lanjut Audit Umum Perkreditan, Operasional & IT periode bulan Februari 2018. - Membahas Rencana Kerja SKAI untuk Tahun 2018. - Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Hendra Buana 6. Edwin indra 7. As'ari
4	26 Maret 2018	- Membahas tindak lanjut temuan OJK tahun 2017. - Membahas tindak lanjut temuan BPK RI. - Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Tufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Eka Afriadi 6. Ikhwan 7. Ahmad Rifa'i 8. Edirison
5	14 Mei 2018	- Membahas Progres Transaksi Non Tunai. - Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Eka Afriadi 4. Fahmi Oemar 5. Indarti 6. Ikhwan 7. Wan Mukhlis 8. Heru Kurniawan 9. Wahyudi G 10. Edi Wardana

6	18 Juli 2018	- Membahas Realisasi Audit Semester I Tahun 2018 - Membahas Rencana Kerja Audit Semester II Tahun 2018 - Membahas Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Temuan Audit baik Audit Umum maupun Audit Khusus - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Hendra Buana 6. Asy'ari 7. Vauli Putra Yandi 8.
7	20-21 Agustus 2018	- Membahas hal-hal yang berkaitan dengan kondisi terkini Cabang Jakarta terutama terkait dengan Dana Pihak Ketiga (DPK), Kredit dan Operasional Bank. - Usaha dan perbaikan/inovasi apa saja yang telah dan akan dilakukan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. - Hal-hal lainya yang dianggap perlu - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Dedy Syamsurizal
8	12 September 2018	- Membahas tentang pengawasan pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan aktivitas Cabang Batam, Capem Batu Aji dan Capem Botania. - Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Asy'ari 6. Wan Abdul Rahman 7. Gunawan 8. Erzon Rinaldi

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Audit baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

Nama	**Jumlah Kehadiran Pada :**			**(%) Kehadiran**
	Rapat Internal Komite	**Rapat Koordinasi**	**Total Jumlah Kehadiran**	
Taufiqurrahman	16	8	24	100%
H. R. Mambang Mit	16	8	24	100%
Fahmi Oemar	16	8	24	100%
Indarti	16	8	24	100%

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komposisi Komite Pemantau Risiko

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komite Pemantau Risiko dibentuk bertujuan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta memberikan rekomendasi dan saran atas berbagai kegiatan perusahaan sehingga perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Direksi.

Untuk komposisi Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2018 berdasarkan SK Direksi Nomor 037A/KEPDIR/2017 tanggal 08 Mei 2017 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
Taufiqurrahman	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
A. Rivaie Rachman	Anggota	Komisaris Independen
Fahmi Oemar	Anggota	Pihak Independen
Indarti	Anggota	Pihak Independen

Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari Komisaris Independen dan pihak Independen. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan dan memiliki keahlian di bidang manajemen risiko Bank.

Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* Bank Riau Kepri dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu–isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah–langkah antisipasi yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.

Diantara tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Bank Riau Kepri adalah :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen secara tahunan.
4. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
5. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.
6. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Perseroan, agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
7. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.
8. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
9. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal perseroan tidak terbatas pada laporan pemeriksaan SKAI dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko.
10. Melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Bank.

Rencana dan Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko

1. Rencana Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Untuk tahun 2018 Komite Pemantau Risiko telah menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko untuk membahas mengenai informasi-informasi yang terkait dengan profil risiko diluar dari laporan reguler dari Divisi Manajemen Risiko.

b. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko untuk membahas laporan profil risiko Bank atau materi lain yang dipandang perlu.

c. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko untuk membahas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Bank.

d. Melakukan kunjungan pengawasan Pemantau Risiko ke Kantor Cabang.

e. Melaksanakan rapat lainnya yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

f. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

2. Realisasi Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2018 kegiatan yang telah direalisasikan oleh Komite Pemantau Risiko, adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko untuk membahas mengenai informasi-informasi yang terkait dengan profil risiko diluar dari laporan reguler dari Divisi Manajemen Risiko.

b. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko untuk membahas laporan profil risiko Bank atau materi lain yang dipandang perlu.

c. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko untuk membahas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Bank.

d. Melakukan kunjungan pengawasan Pemantau Risiko ke Kantor Cabang Tanjung Pinang, Cabang Pembantu Kijang, Kedai dan Kantor Kas di wilayah Tanjung Pinang.

e. Melaksanakan rapat lainnya yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

f. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Aktivitas Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut di atas, sepanjang tahun 2018 Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran–saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank di dalam 13 (tiga belas) kali rapat/pertemuan.

Rapat yang diselenggarakan oleh Komite Pemantau Risiko secara internal sebanyak 5 (lima) kali rapat/pembahasan, yaitu sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	23 April 2018	- Membahas tentang Penerapan Manajemen Risiko. - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
2	12 Juli 2018	- Membahas tentang Surat dari OJK No.SR-117/KO.053/2018 mengenai Perkembangan Bisnis PT.Bank Riau Kepri. - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti

3	23 Juli 2018	- Membahas tentang Laporan Direksi tanggal 17 Juli 2018 tentang Pemberitahuan Pendanaan Kredit Sindikasi an.PT. Marga Trans Nusantara. - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
4	18 Desember 2018	- Membahas Perihal Persetujuan Draft BPP Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Dari Direktur Kepatuhan Dan Manajemen Risiko - Membahas Hal-Hal Lain Yang Dianggap Perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
5	31 Desember 2018	- Membahas tentang Tingkat Kesehatan Bank untuk Kinerja PT. Bank Riau Kepri bulan November 2018 - Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti

Untuk rapat koordinasi Komite Pemantau Risiko dengan unit kerja Bank lainnya telah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali rapat/pembahasan, sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	25 Januari 2018	- Membahas Laporan Tingkat Kesehatan Bank – Desember 2017. - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Eka Afriadi 4. Fahmi Oemar 5. Indarti 6. Ikhwan 7. Heru Kurniawan
2	26 Maret 2018	- Membahas tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2017. - Membahas tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPKRI). - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Eka Afriadi 4. Fahmi Oemar 5. Indarti
3	14 Mei 2018	- Membahas progress transaksi non tunai PT Bank Riau Kepri. - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Eka Afriadi 4. Fahmi Oemar 5. Indarti 6. Ikhwan 7. Wan Mukhlis 8. Heru Kurniawan 9. Wahyudi Gustiawan
4	2 Agustus 2018	- Membahas tentang Progress Implementasi Standar Nasional Teknologi chip dan pin online 6 digit pada kartu ATM dan atau kartu debet. - Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Fahmi Oemar 3. Indarti 4. As'ari 5. Fivian Heldi
5	23 Agustus 2018	- Membahas tentang potensi risiko dari aktivitas operasional PT.Bank Riau Kepri pada Cabang Tanjung Pinang, Capem Kijang dan Capem lainnya. - Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Dedi Santika 6. Musnardi Putra
6	24 Agustus 2018	- Membahas tentang kondisi terkini dari Cabang Tanjung Pinang dan membahas potensi risiko dari aktivitas operasional PT. Bank Riau Kepri. - Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. Fahmi Oemar 3. Indarti 4. Dedi Santika

7	3 Oktober 2018	- Membahas tentang Likuiditas, pengelolaan dana di Divisi Treasury dan program dasi Divisi Produk dan Jasa. - Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Heru Kurniawan 6. Yudhi A.Y 7. Wahyudi G
8	11 Desember 2018	- Membahas tentang Risk Appetite Statement Bank Riasu Kepri Tahun 2019. - Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Eka Afriadi 6. Heru Kurniawan

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil keputusan rapat komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Kehadiran Pada :			% Kehadiran
	Rapat Internal Komite	Rapat Koordinasi	Total Jumlah Kehadiran	
Taufiqurrahman	5	8	13	100 %
H. Rivaie Rachman	5	6	11	85 %
Fahmi Oemar	5	8	13	100 %
Indarti	5	8	13	100 %

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan Remunerasi dan Nominasi.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari Komisaris independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia (Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia). Untuk anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia (Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia) memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank, dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan dan memiliki keahlian di bidang manajemen risiko Bank.

Untuk komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2018 berdasarkan SK Direksi Nomor 037A/KEPDIR/2017 tanggal 08 Mei 2017 tentang Susunan Anggota Komite

Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Susunan Keanggotaan Remunerasi dan Nominasi		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
A. Rivaie Rachman	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Mambang Mit	Anggota	Komisaris Utama
Yuharman	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia

Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Riau Kepri dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Terkait dengan bidang remunerasi :
   a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
      1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
      2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
   c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
      3) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
      4) Prestasi kerja individual
      5) Kewajaran dengan *peer group*
      6) Perimbangan dan strategi jangka panjang Bank
2. Terkait dengan bidang nominasi :
   a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Rencana Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk tahun 2018 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun rencana kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu sebagai berikut :

a. Mereview kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
b. Mengadakan rapat untuk membahas perpanjangan anggota Komite.
c. Mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris.
d. Mengadakan rapat dengan Direksi dan Satuan Kerja (MSDM).
e. Rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

2. Realisasi Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2018 program kerja yang telah dilaksanakan/direalisasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain sebagai berikut :

a. Melakukan *review* kebijakan remunerasi Dewan Komisaris/Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
b. Mengadakan rapat untuk membahas perpanjangan anggota Komite.
c. Menyusun rekomendasi calon Komisaris dan calon Direksi Bank untuk disampaikan kepada RUPS.
d. Mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris.
e. Mengadakan rapat dengan Direksi.

Aktivitas Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.

Sesuai ketentuan bahwa rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Sepanjang tahun 2018 Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah melakukan pembahasan dalam bentuk pertemuan/rapat sebanyak 8 (delapan) kali rapat/pertemuan, dengan rincian sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	8 Januari 2018	1. Menyetujui perpanjang masa kerja Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sampai dengan 1 Februari 2019 2. Menyetujui Honorarium yang diterima tetap sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan per orang 3. Segera disampaikan kepada Dewan Komisaris	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R. Mambang Mit 3. Yuharman
2	23 Januari 2018	Membahas masalah *Self Assesment* Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap Calon Direktur Kredit dan Syariah PT. Bank Riau Kepri	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R. Mambang Mit 3. Yuharman
3	31 Januari 2018	1. Usulan Remunerasi Pengurus PT. Bank Riau Kepri. 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R. Mambang Mit 3. Yuharman
4	16 Juli 2018	Membahas Pencalonan Calon Direksi PT. Bank Riau Kepri	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R. Mambang Mit 3. Yuharman
5	20 Juli 2018	Proses Pencalonan Calon Direksi PT. Bank Riau Kepri	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R. Mambang Mit 3. Yuharman
6	30 Juli 2018	Proses Pencalonan Calon Direksi PT. Bank Riau Kepri	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R. Mambang Mit 3. Yuharman
7	3 Agustus 2018	Membahas Hasil Seleksi Calon Direksi PT. Bank Riau Kepri	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R. Mambang Mit 3. Yuharman
8	4 Desember 2018	Membahas Tindak Lanjut Hasil RUPSLB PT. Bank Riau Kepri	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R. Mambang Mit 3. Yuharman 4. Fajar Restu F 5. Arhim Syafe'i 6. Ahmad Rifa'i

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dan segala keputusan rapat komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota komite.

Hasil keputusan rapat komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan didokumentasikan.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
A. Rivaie Rachman	8	100 %
H. R. Mambang Mit	8	100 %
Yuharman	8	100 %

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF YANG DIMILIKI OLEH BANK

Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, Direksi telah membentuk komite eksekutif yang berfungsi membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya, yang terdiri dari : Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite ALCO, Komite Kredit, Komite Anti *Fraud* dan Komite Sumber Daya Manusia.

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 032/KEPDIR/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi PT. Bank Riau Kepri.

Susunan Keanggotaan

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI	
Direktur Operasional	Ketua merangkap Anggota
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Anggota
Direktur Dana & Jasa	Anggota
Direktur Kredit & Syariah	Anggota
Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	Sekretaris
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Anggota
Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa	Anggota
Pemimpin Divisi Keuangan dan Operasional	Anggota
Pemimpin Divisi Umum	Anggota
Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	Anggota
Pemimpin Divisi Manajemen SDM	Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab

Memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain mencakup :

a. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;

b. Perumusan kebijakan, standar dan prosedur Teknologi Informasi yang utama;

c. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;

d. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);

e. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank;

f. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalikan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank;

g. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi;

h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien dan tepat waktu;

i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Rapat Komite Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2018 Komite Teknologi Informasi telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel di bawah ini :

RAPAT KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2018	
Tanggal	**Agenda**
Kamis, 27 Desember 2018	Pembahasan Perpanjangan Sewa *Core Banking* dan Kesiapan *Core Banking System* dalam Rencana Konversi ke Syariah.

2. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (RMCO) dibentuk bertujuan untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen. Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan di dalam Keputusan Direksi Nomor 077/KEPDIR/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Komite Manajemen Risiko.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko di Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO	
Ketua I	Direktur Utama
Ketua II	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Sekretaris	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
Anggota	Direktur Operasional
	Direktur Dana dan Jasa
	Direktur Kredit dan Syariah
	Pemimpin Divisi Komersial

	Pemimpin Divisi Konsumer
	Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah
	Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
	Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa
	Pemimpin Divisi Syariah
	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

Misi, Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko memiliki Misi, Tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut :

a. Misi

Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya aktivitas/kegiatan usaha Bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Sehingga, Komite Manajemen Risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha Bank yang senantiasa tidak lepas dari risiko.

b. Tugas dan Tanggung jawab

1) Bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko yang efektif di Bank Riau Kepri.
2) Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman manajemen risiko.
3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan *eksposure* risiko.
4) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
5) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko.
6) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia yang menyangkut penerapan manajemen risiko.
7) Mengembangkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi.
8) Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
9) Berwenang dan bertanggung jawab terhadap perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala, sebagaimana diatur/ dipersyaratkan di dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
10) Menjalankan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2018 Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini :

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2018	
Tanggal	**Agenda**
23 Januari 2018	Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank periode Desember 2017
20 April 2018	Pembahasan Laporan Profil Risiko periode Maret 2018
5 Juli 2018	Pembahasan *Stress Test* Likuiditas Bank
17 Oktober 2018	Pembahasan Laporan Profil Risiko periode September 2018

3. Komite Pembiayaan

Bank telah membentuk Komite Pembiayaan yang bertujuan memberikan masukan dan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Direktur Utama dalam mengambil keputusan. Pembentukan Komite Pembiayaan ditetapkan di dalam Keputusan Direksi Nomor 033/KEPDIR/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Susunan dan Tata Tertib Komite Pembiayaan PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite Pembiayaan Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE PEMBIAYAAN	
Ketua (merangkap anggota)	Direktur Kredit dan Syariah
Sekretaris (merangkap anggota)	Pemimpin Divisi Syariah
Anggota	Direktur Dana dan Jasa
	Pemimpin Bagian Pembiayaan – Divisi Syariah
	Pemimpin Bagian Perencanaan, Pengembangan Produk dan Jasa – Divisi Syariah
Supporting	Staf Pembiayaan – Divisi Syariah
	Staf Analis Pembiayaan – Divisi Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan, antara lain sebagai berikut :

a. Membahas permohonan pembiayaan nasabah di atas plafon tertentu yang diusulkan oleh kantor Cabang dan permohonan pembiayaan sindikasi, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

b. Memberikan rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Keputusan Direktur Utama.

c. Rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan dilaksanakan secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki, obyektif dan mengedepankan integritas.

Jika diperlukan komite pembiayaan dapat melakukan koordinasi dengan ALCO dalam aspek pendanaan pembiayaan.

Rapat Komite Pembiayaan

Sepanjang tahun 2018 Komite Pembiayaan telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini :

RAPAT KOMITE PEMBIAYAAN TAHUN 2018	
Tanggal	**Agenda**
04 Juni 2018	Rapat Pembahasan Pembiayaan Sindikasi Syariah kepada PT. Pemalang Batang Tol Road.
13 November 2018	Rapat Pembahasan Pembiayaan Sindikasi Syariah kepada PT. Cimanggis Cibitung Tollways.

4. Komite ALCO

Pengelolaan seluruh risiko bisnis Bank harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan pengelolaan *asset* dan *liability*, Bank Riau Kepri telah memiliki Komite ALCO yang tertuang di dalam Keputusan Direksi tentang *Asset Liability Management* PT. Bank Riau Kepri.

Saat ini ketentuan mengenai Komite ALCO diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 097/KEPDIR/2018 tanggal 05 September 2018 tentang Susunan Organisasi *Asset Liability Committee* (ALCO) PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite ALCO Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE ALCO	
Ketua I merangkap anggota tetap	Direktur Utama
Ketua II merangkap anggota tetap	Direktur Dana dan Jasa
Wakil Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Kredit dan Syariah Direktur Operasional Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Sekretaris merangkap anggota tetap	Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
Anggota Tetap	Pemimpin Divisi Komersial Pemimpin Divisi Konsumer

	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah Pemimpin Divisi Syariah Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa Pemimpin Divisi Keuangan & Operasional Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
Anggota Tidak Tetap	Pemimpin Divisi Umum Pemimpin Divisi Hukum Pemimpin SKAI Pemimpin Divisi Manajemen SDM Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO adalah melakukan pengelolaan *Asset* dan *Liabilities Management* (ALMA) yang meliputi *liquidity management, gap management, forex management, earning and investment management*, dengan mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi serta dampaknya kepada posisi Bank Riau Kepri dengan menghitung *cost of funds*, menetapkan *base lending rate/prime landing rate* dan menetapkan *internal fund transfer price.*

Rapat Komite ALCO

Sepanjang tahun 2018, Komite ALCO telah menyelenggarakan 12 kali rapat/pembahasan, dengan rincian sebagai berikut :

RAPAT KOMITE ALCO TAHUN 2018	
Tanggal	**Agenda**
26 Januari 2018	1. *Review* Keputusan ALCO terakhir 2. *Update* Ekonomi dan Pasar 3. Manajemen Likuiditas 4. Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga 5. Pembahasan lainnya.
27 Februari 2018	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Februari 2018 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Februari 2018 3. Perhitungan *Fund Transfer Pricing*
28 Maret 2018	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Maret 2018 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Maret 2018 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO

30 April 2018	1. *Review* Keputusan ALCO terakhir 2. *Update* Ekonomi dan Pasar 3. Manajemen Likuiditas 4. Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga 5. Pembahasan lainnya.
28 Mei 2018	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Mei 2018 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Mei 2018 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
26 Juni 2018	1. *Review* Keputusan ALCO terakhir 2. *Update* Ekonomi dan Pasar 3. Manajemen Likuiditas 4. Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga 5. Pembahasan lainnya.
30 Juli 2018	1. *Review* Keputusan ALCO terakhir 2. *Update* Ekonomi dan Pasar 3. Manajemen Likuiditas 4. Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga 5. Pembahasan lainnya.
30 Agustus 2018	1. *Review* Keputusan ALCO terakhir 2. *Update* Ekonomi dan Pasar 3. Manajemen Likuiditas 4. Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga 5. Pembahasan lainnya.
18 September 2018	1. *Review* Keputusan ALCO terakhir 2. *Update* Ekonomi dan Pasar 3. Manajemen Likuiditas 4. Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga 5. Pembahasan lainnya.
29 Oktober 2018	1. *Review* Keputusan ALCO terakhir 2. *Update* Ekonomi dan Pasar 3. Manajemen Likuiditas 4. Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga 5. Pembahasan lainnya.
30 November 2018	1. *Review* Keputusan ALCO terakhir 2. *Update* Ekonomi dan Pasar 3. Manajemen Likuiditas 4. Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga 5. Pembahasan lainnya.

28 Desember 2018	1. *Review* Keputusan ALCO terakhir 2. *Update* Ekonomi dan Pasar 3. Manajemen Likuiditas 4. Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga 5. Pembahasan lainnya.

5. Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan sektor yang sangat strategis di setiap usaha keuangan dan perbankan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang menyangkut sektor tersebut membutuhkan perencanaan, riset dan evaluasi mendalam. Setelah itu, harus diimplementasikan secara tepat dan dalam pengawasan yang cukup ketat.

Komite Kebijakan Perkreditan Bank Riau Kepri dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. 62/KEPDIR/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Komite Kebijakan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Kredit dan Syariah
Wakil Ketua	Direktur Operasional
Sekretaris I	Pemimpin Divisi Komersial
Sekretaris II	Pemimpin Divisi Konsumer
Sekretaris III	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah
Anggota	Pemimpin Divisi Syariah
	Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern
	Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan, meliputi sebagai berikut :

a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan KPB, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.

b. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB.

c. Melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB.

d. Memantau dan mengevaluasi :

1) Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;

2) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;

3) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;

4) Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK;

5) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;

6) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB; dan

7) Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan, adalah sebagai berikut :

a. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai :

1) Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB;

2) Hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan.

b. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Sepanjang tahun 2018 Komite Kebijakan Perkreditan tidak ada menyelenggarakan rapat.

6. Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia Bank diatur di dalam BPP Kepegawaian Bank Riau Kepri Bab IV Masa Orientasi, Penempatan dan Mutasi, poin 4.8 Komite Sumber Daya Manusia dan Tim Mutasi Tenaga Pimpinan.

Susunan Keanggotaan

Susunan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia	
Direktur Utama	Ketua (merangkap Anggota)
Direktur Operasional	Anggota
Direktur Kredit & Syariah	Anggota
Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia	Sekretaris

Tugas Umum dan Tanggung Jawab Utama Komite SDM, meliputi :

a. Perencanaan dan penerimaan Pegawai :
   - Mempertimbangkan dan menyetujui prakiraan Pegawai
   - Menyetujui rencana-rencana kegiatan tertentu dan waktu pelaksanaan yang diusulkan Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
   - Mempertimbangkan dan menyetujui anggaran SDM secara keseluruhan
   - Mempertimbangkan ragam dan target penerimaan pegawai (jumlah dan kualifikasinya)

b. Memutus usul/rekomendasi mengenai mutasi tenaga Pimpinan.

c. Manajemen Jalur Karir
   - Memutus sistem dan pelaksanaan manajemen jalur karir
   - Menentukan Program Jalur Karir tahunan bagi peserta manajemen jalur karir
   - Menentukan penambahan/pengurangan peserta manajemen jalur karir

d. Manajemen Imbalan
   - Menyetujui sistem/pedoman fasilitas pegawai (*employee benefits*);
   - Menyetujui pedoman cara-cara penggajian dan pemberian imbalan lainnya

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2018 Komite Sumber Daya Manusia telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini :

RAPAT KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2018	
Tanggal	**Agenda**
9 Maret 2018	Pembahasan Program Pengembangan SDM yang Strategis serta Penetapan Promosi dan Mutasi Pegawai
3 Juli 2018	Pembahasan Seleksi Jabatan Terbuka
3 Oktober 2018	Pembahasan Pengisian Posisi Jabatan Strategis yang Masih Kosong serta Penetapan Promosi dan Mutasi Pegawai
30 Oktober 2018	Pembahasan Pengisian Posisi Jabatan Strategis yang Masih Kosong akibat Klasifikasi Capem Kelas A serta Penetapan Promosi dan Mutasi Pegawai

7. Komite Anti *Fraud*

Susunan Keanggotaan

Komite Anti *Fraud* dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 091/KEPDIR/2017 tanggal 13 November 2017, dengan komposisi keanggotaannya adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE ANTI *FRAUD*	
Ketua	Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern
Sekretaris	Pemimpin Unit Investigasi *Fraud*
Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	Pemimpin Divisi Hukum
	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Anti *Fraud* memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Membuat pedoman penerapan strategi anti *fraud* untuk diterapkan Bank yang disetujui oleh Direksi.
b. Mendorong dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya yang terkait untuk menjalankan pelaksanaan implementasi strategi anti *fraud* yang telah disetujui Direksi.
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kejadian-kejadian *fraud* dan memastikan dilakukan tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal guna mencegah terulangnya kembali *fraud* yang serupa.
d. Melakukan sosialisasi dan pembelajaran secara periodik terhadap seluruh pegawai terkait dengan kebijakan, prosedur dan penerapan strategi anti *fraud* yang ditetapkan bank.
e. Mengkoordinasikan peningkatan pemahaman pegawai mengenai *fraud* seperti bentuk-bentuk *fraud*, transparansi hasil investigasi dan tindak lanjut terhadap *fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.
f. Mengkoordinasikan peningkatan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* dengan cara pembuatan brosur anti *fraud*, penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya.
g. Menetapkan metode penilaian dan pengukuran terhadap kejadian *fraud* termasuk proses monitoring dan kontrol serta pengelolaan *database* untuk setiap kejadian *fraud* baik yang sudah terjadi maupun dalam usaha percobaan namun tidak terealisasi.
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi kerawanan dengan melakukan identifikasi, analisis dan menilai potensi terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap aktifitas bank.
i. Mendokumentasikan dan menginformasikan hasil identifikasi kerawanan kepada pihak berkepentingan dan selalu dikinikan terutama terhadap aktifitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *fraud*.
j. Berkoordinasi dengan Divisi Kepatuhan dalam penerapan *whistleblowing system* serta SKAI dalam pelaksanaan *surprise audit* dan *surveillance system*.
k. Memantau dan melaporkan pelaksanaan strategi anti *fraud* kepada Direksi dan regulator/otoritas secara berkala.

Rapat Komite Anti *Fraud*

Sepanjang tahun 2018 Komite Anti *Fraud* telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini :

RAPAT KOMITE ANTI *FRAUD* TAHUN 2018	
Tanggal	**Agenda**
4 Januari 2018	Pembahasan Laopran Penerapan Strategi Anti Fraud periode Desember 2017
3 Juli 2018	Pembahasan Laopran Penerapan Strategi Anti Fraud periode Semester I tahun 2018

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan Bank saat ini diatur di dalam kebijakan Direksi mengenai Pedoman Benturan Kepentingan sebagaimana termuat di dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 56/KEPDIR/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan *(Conflict of Interest)*. Di dalam kebijakan tersebut diatur mengenai bentuk-bentuk benturan kepentingan, pencegahan dan penanganan benturan kepentingan serta sanksi jika terjadi benturan kepentingan.

Tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan sepanjang tahun 2018, namun pada periode laporan terdapat kelemahan dalam pengungkapan benturan kepentingan yaitu Bank belum mengungkapkan benturan kepentingan dalam persetujuan pemberian kredit kepada pihak terkait yaitu pejabat daerah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi.

PENERAPAN FUNGSI DAN BUDAYA KEPATUHAN

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan dapat menjadi tolak ukur atas penilaian nasabah dan pemegang saham terhadap kinerja Bank.

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Sedangkan Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Riau Kepri telah menyusun dan memberlakukan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 042/KEPDIR/2017 tanggal 31 Mei 2017. BPP Kepatuhan tersebut mengatur lebih spesifik mengenai Peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan, yang nantinya diharapkan akan menjadi lebih *forward looking* dan lebih sensitif terhadap dinamika perubahan pada kegiatan usaha Bank.

Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri, fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, diatur sebagai berikut :

1. Direktur Kepatuhan berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak pemeriksa eksternal lainnya.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan, meliputi antara lain :
   a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
   b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
   c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
   d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
   e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
   f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   g. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak pemeriksa eksternal lainnya.
   h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

   Tugas dan tanggung jawab tersebut di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme meliputi antara lain :

a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK yang menyangkut Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Keluar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) yang telah disusun oleh Divisi Kepatuhan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

c. Merencanakan dan monitoring Program Pengkinian Data Nasabah berdasarkan Risiko/ *Risk Based Approach*.

d. Memastikan bahwa penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah dilaksanakan secara efektif.

e. Memastikan bahwa Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan/atau transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi transfer dana dalam dan keluar negeri telah ditangani dan dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan BPP APU dan PPT.

4. Direktur Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi:

   a. bisnis dan operasional;

   b. manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;

   c. treasury;

   d. keuangan dan akuntansi;

   e. logistik dan pengadaan barang/jasa;

   f. teknologi informasi; dan

   g. audit intern/SKAI.

5. Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi :

   a. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam rencana bisnis Bank;

   b. Laporan kepatuhan; dan

   c. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurutnya telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur Kepatuhan.

   Laporan sebagaimana dimaksud di atas wajib ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan, dan disampaikan kepada OJK secara semesteran dan diterima OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

Sehubungan dengan fungsi kepatuhan yang diatur di atas, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Menetapkan strategi Budaya Kepatuhan, antara lain :
   a. Menyusun *Compliance Charter* (piagam kepatuhan).
   b. Menyusun *Compliance Code of Conduct* (kode etik kepatuhan).
   c. Menyusun *Compliance Policy* (kebijakan kepatuhan).
2. Melakukan sosialisasi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri.
3. Melakukan sosialisasi Kode Etik Kepatuhan dan *Whistle Blowing System.*
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pedoman APU & PPT serta pedoman Tata Kelola yang Baik.
5. Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
6. Memantau tindaklanjut pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia/OJK dan pihak regulator lainnya.
7. Menyusun dan melaporkan hasil penilaian dan pelaksanaan penerapan Tata Kelola.
8. Melakukan pengujian terhadap kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menyampaikan laporan rencana kerja Kepatuhan yang dimuat di dalam laporan Rencana Bisnis Bank (RBB).
10. Menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Terkait dengan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, Bank telah melaporkan kepada OJK, antara lain sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN KETENTUAN KEHATI-HATIAN BANK		
Jenis Laporan	**Penilaian Pada Periode Laporan**	
	Juni 2018	**Desember 2018**
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	20,83 %	20,28 %
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	0,17 %	0,13 %
Kredit Kualitas Rendah	7,21 %	5,19 %
Non Performing Loan (NPL) Gross	3,43 %	2,97 %
Non Performing Loan (NPL) Netto	0,21 %	0,19 %
Tingkat Kesehatan Bank	3 (Cukup Sehat)	3 (Cukup Sehat)

Langkah-langkah yang telah ditempuh dan dilakukan oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko di atas masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait pemahaman dan disiplin karyawan terhadap ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal dan sistem kontrol atas implementasi terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian perbaikan yang

berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktik-praktik prinsip Tata Kelola yang Baik dan praktik kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Unit Kerja Di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan memiliki 3 (tiga) unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas-tugas Direktur Kepatuhan Bank. Unit kerja yang berada di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko adalah Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Hukum. Pembentukan unit kerja tersebut sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank Riau Kepri.

Tugas dan Tanggung jawab Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Hukum antara lain adalah sebagai berikut :

1. **Divisi Kepatuhan**

   a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.

   b. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

   c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   d. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

   e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   f. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak pemeriksa eksternal lainnya.

   g. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi dan Budaya Kepatuhan Bank.

   h. Membantu Direktur Kepatuhan dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK yang menyangkut Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

   i. Membuat laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Keluar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa

Terpadu (SIPESAT) untuk disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

j. Merencanakan dan monitoring Program Pengkinian Data Nasabah berdasarkan Risiko/ *Risk Based Approach.*

k. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sesuai dengan pedoman Bank.

l. Menyusun laporan Direktur Kepatuhan berupa :

   1) Laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;

   2) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Keluar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT);

   3) Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan :

      - Laporan Kepatuhan semesteran;
      - Laporan Khusus.

m. Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.

n. Memantau penyampaian laporan ke Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak ekstern lainnya pada masing-masing satuan kerja.

o. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

2. Divisi Manajemen Risiko

a. Mengelola kebijakan risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya.

b. Mengelola strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh RMCO dan telah disetujui oleh Direksi serta memantau pelaksanaannya.

c. Mengembangkan metode dan modul pengukuran risiko.

d. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR).

e. Mengembangkan perangkat aplikasi pengukuran dan pengendalian risiko.

f. Melakukan kajian risiko atas usulan produk atau aktivitas baru serta mendukung/memberikan solusi untuk percepatan target kinerja unit bisnis dan unit kerja terkait lainnya.

g. Melakukan pengukuran, analisa risiko kredit, pemantauan dan pengendalian, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank.

h. Merekomendasikan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mitigasi risiko kepada satuan kerja operasional dan atau kepada Komite Manajemen Risiko (RMCO).

i. Meningkatkan kompetensi pengurus dan pejabat Bank dalam rangka Sertifikasi Manajemen Risiko.

3. **Divisi Hukum**

   a. Bertanggung jawab terhadap tuntutan hukum yang dihadapi oleh Bank, baik di dalam maupun diluar pengadilan.

   b. Bertanggungjawab dalam hal membuat perjanjian/perikatan antara Bank dengan pihak ketiga dan kegiatan dibidang hukum lainnya.

   c. Memberikan bantuan *advis*/saran hukum menyangkut permasalahan hukum yang terjadi di Bank.

Sistem Kepatuhan

Sistem Kepatuhan Bank dilaksanakan melalui serangkaian proses dan tahapan untuk menjamin kepatuhan Bank terhadap regulasi yang berlaku, meliputi :

1. Prosedur Kepatuhan (*Compliance Procedure*)

   Dimaksudkan untuk membangun *awareness* segenap jajaran Bank terhadap prosedur kerja dan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.

2. Pengujian Kepatuhan (*Compliance Review*), meliputi :

   a. Pengujian Kebijakan

      Adalah memastikan bahwa setiap ketentuan, kebijakan dan standar operasional prosedur Bank sesuai dengan regulasi yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan ketentuan eksternal lainnya.

   b. Pengujian Rencana Pemberian Kredit/Pembiayaan

      Adalah memastikan bahwa setiap rencana pemberian kredit/pembiayaan yang menjadi wewenang Direksi telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan eksternal lainnya.

   c. Pengujian Permasalahan Operasional Bank

      Adalah pengujian terhadap permasalahan-permasalahan operasional Bank pada setiap satuan kerja, meliputi permasalahan sebagai berikut :

      1) Belum ada peraturan internal yang mengatur, sehinga satuan kerja perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan BI/OJK dan ketentuan yang berlaku.

      2) Kebijakan yang akan diambil telah diatur di dalam ketentuan internal, namun perlu penafsiran/penjelasan lebih lanjut.

Kegiatan Unit Kerja Kepatuhan

Sesuai dengan SOT Bank Riau Kepri, struktur Satuan Kerja Kepatuhan (Divisi Kepatuhan) memiliki 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Kepatuhan, Kebijakan & GCG dan Bagian Unit Kerja

Pengenalan Nasabah (UKPN). Sepanjang tahun 2018 Divisi Kepatuhan telah melakukan kegiatan-kegiatan, diantaranya namun tidak terbatas pada :

1. Melakukan pengkajian Rencana Keputusan dan Rancangan Kebijakan Bank.
2. Melakukan pengkajian dan pengujian kepatuhan terhadap produk dan jasa Bank.
3. Memastikan bahwa tidak terjadi denda akibat keterlambatan Laporan pada Bank Indonesia/OJK.
4. Melakukan monitoring terhadap temuan Bank Indonesia/OJK dan pihak regulator lainnya.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola tahun 2017 kepada pihak-pihak terkait.
6. Menyusun dan menerbitkan beberapa kebijakan Bank yaitu sebagai berikut :
   a. Surat Keputusan Direksi No. 110/KEPDIR/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pedoman Sistem Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System)* PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
   b. Surat Keputusan Direksi No. 111/KEPDIR/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pedoman Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
7. Melakukan sosialisasi/pelatihan terkait Kebijakan Tata Kelola Bank, Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*), *Whistleblowing System* dan monitoring penerapan Budaya Kepatuhan pada beberapa jaringan kantor Bank.
8. Terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Divisi Kepatuhan sepanjang tahun 2018 telah menyusun dan menerbitkan :
   a. Surat Keputusan Direksi Nomor 049/KEPDIR/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Aplikasi *Walk in Customer* (WIC).
   b. Surat Keputusan Direksi Nomor 051/KEPDIR/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Aplikasi Pemantauan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
   c. Surat Keputusan Direksi Nomor 062/KEPDIR/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Aplikasi Pemantauan Transaksi Keuangan Pegawai.
   d. Surat Keputusan Direksi Nomor 072/KEPDIR/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Direksi Nomor 068/KEPDIR/2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
   e. Surat Keputusan Direksi No. 142/KEPDIR/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Aplikasi Pemantauan dan Pengkinian Nasabah Berisiko Tinggi Kategori Politically Exposed Person (PEP).
   f. Surat Edaran Direksi Nomor 014/SE/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) Terhadap *Walk in Customer* (CDD).
   g. Surat Edaran Direksi Nomor 016/SE/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Identifikasi dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
9. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap kegiatan pengkinian data Nasabah dan *progress* kegiatan *single* CIF ke beberapa jaringan kantor cabang Bank.

10. Memberikan pelatihan APU & PPT secara berkala kepada petugas *frontliner (customer service* dan *teller*) baru dan *refresh* serta kepada Pemimpin Seksi Pelayanan Cabang, Pemimpin Seksi Operasional Capem dan Pemimpin Kedai (baru & *refresh*).
11. Mengikutsertakan pegawai Divisi Kepatuhan pada *Public Training* yang diselenggarakan oleh FKDKP.
12. Mengikutsertakan pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT, dan/atau pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK/OJK pada :
    a. *Inhouse Training* dengan tema "Peran dan Tanggung Jawab Petugas Bank Dalam Mencegah /Memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme" dengan narasumber dari PPATK, Bank BCA dan beberapa Divisi Kantor Pusat yang terkait.
    b. *Inhouse Training* dengan tema "Dasar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme" dengan narasumber Bagian UKPN Divisi Kepatuhan.
    c. *Public Training* yang diselenggarakan oleh PPATK dengan tema "Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Jasa Keuangan".
13. Melakukan penyempurnaan infrastruktur terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan terhadap calon nasabah dan nasabah Bank.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan *(Compliance Director)* dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), ditetapkan bahwa Bank wajib menerapkan fungsi audit intern Bank, untuk membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini Auditor Intern mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Di samping itu, SKAI harus mampu mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana yang ada.

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan operasional Bank, sejak awal Bank Riau Kepri telah membentuk unit kerja yang menjalankan fungsi audit intern untuk memastikan bahwa struktur pengendalian intern yang ada pada Bank telah berjalan sebagaimana mestinya.

Susunan Organisasi dan Panduan Kerja Audit Intern

Berdasarkan SK Direksi No. 66/KEPDIR/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, ditegaskan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dipimpin oleh seorang Pemimpin SKAI setingkat Pemimpin Divisi, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan

Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. SKAI memiliki 2 (dua) bagian di bawahnya, yaitu Bagian Pengawasan dan Bagian Pemeriksaan.

Dalam melakukan tugasnya, SKAI berpedoman pada Piagam Audit Internal *(Internal Audit Charter)* dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 097/KEPDIR/2017 tanggal 30 November 2017, yang dalam penyusunannya tetap mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagai standar yang memuat ukuran minimal tentang Fungsi Audit Intern yang perlu diselenggarakan oleh Bank umum serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Intern tersebut.

Persyaratan Auditor Internal

Auditor Internal Bank harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 017/KEPDIR/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Persyaratan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Wajib memiliki standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku secara internasional.
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan SK Direksi No. 66/KEPDIR/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, *Internal Audit Charter* dan BPP Pengawasan Berbasis Risiko sebagaimana telah diubah dengan BPP Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Riau Kepri, Satuan Kerja Audit Intern melakukan tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja/strategi bisnis Satuan Kerja Audit Intern dan unit kerja di bawah supervisi dalam bentuk KPI *(Key Performance Indicator).*
2. Menyusun anggaran *(budget)* tahunan dan melakukan monitoring/pengendalian atas pelaksanaannya.
3. Menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan secara aktif (*on-site)* dan pemantauan secara pasif *(off-site*) serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.
4. Memberikan penilaian terhadap sistem pengendalian intern dan prosedur yang ada pada seluruh aspek kegiatan Bank untuk memperoleh keyakinan tercapainya tujuan dan sasaran Bank secara optimal.
5. Melaksanakan proses kegiatan audit secara profesional dan independen dan proaktif serta kontinyu sesuai dengan *internal audit charter* dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Riau Kepri dan ketentuan yang berlaku.
6. Melakukan audit terhadap hal-hal di luar rencana kerja, baik itu atas permintaan internal maupun eksternal yang berwenang sesuai persetujuan Direksi.
7. Melakukan koordinasi tugas dan mendampingi pemeriksaan eksternal dalam rangka kelancaran pemeriksaan.
8. Me-*review* semua kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi audit intern dalam melakukan tugasnya.
9. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Bank Riau Kepri untuk memberikan nilai tambah (*value added*) sepanjang sumber daya yang kompeten dan memadai telah tersedia serta tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SKAI.

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*)

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Bank ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 017/KEPDIR/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang di dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Struktur dan Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
2. Visi dan Misi SKAI
3. Tujuan dan Tanggung Jawab SKAI
4. Wewenang SKAI
5. Kode Etik
6. Independensi dan Obyektivitas
7. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan SKAI
8. Persyaratan dan Pengembangan Auditor SKAI
9. Perlindungan Hukum
10. Program Pengendalian Mutu Audit
11. Hubungan SKAI dengan Auditor Eksternal
12. *Review*

Laporan Kegiatan Audit Internal

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) tahun 2018 yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, SKAI telah melakukan hal-hal terkait dengan rencana kerja tahun 2018 sebagai berikut :

1. Membuat Laporan *Quality Assurance* terhadap 20 (dua puluh) auditor kantor cabang Bank.
2. Melakukan pelatihan dan pertemuan intern SKAI serta pembekalan dan sertifikasi Audit Intern.
3. Melakukan audit Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI-RTGS, SKN-BI, KDHN, BI-ETP dan BI-SSSS).
4. Melakukan Audit Umum Teknologi Informasi *Core Banking* Syariah (*Vision* Syariah).
5. Melaksanakan Audit Umum (*on site*) terhadap 11 (sebelas) kantor cabang Bank dan 11 (sebelas) Divisi di Kantor Pusat Bank, Audit Tematik, dan Audit Pendalaman yaitu sebagai berikut :

Audit Umum Kantor Cabang

No.	Auditee	Tanggal Pelaksanaan
1	Audit Umum Cabang Jakarta	18 Februari – 24 Februari 2018
2	Audit Umum Cabang Pasir Pangaraian	20 Maret - 7 April 2018
3	Audit Umum Cabang Tanjung Pinang	21 Maret - 20 April 2018
4	Audit Umum Cabang Bangkinang	22 Maret - 5 April 2018
5	Audit Umum Cabang Pekanbaru	2 Mei - 28 Mei 2018
6	Audit Umum Cabang Utama	2 Mei - 15 Mei 2018
7	Audit Umum Cabang Syariah Pekanbaru	2 Mei - 16 Mei 2018
8	Audit Umum Cabang Batam	13 Agustus - 29 Agustus 2018
9	Audit Umum Cabang Pangkalan Kerinci	13 Agustus - 28 Agustus 2018
10	Audit Umum Cabang Dumai	13 Agustus - 28 Agustus 2018
11	Audit Umum Cabang Selatpanjang	13 Agustus - 28 Agustus 2018

Audit Umum Divisi Kantor Pusat

No.	Auditee	Tanggal Pelaksanaan
1	*Desk Corporate Secretary*	30 April – 15 Mei 2018
2	Divisi Perencanaan Strategis	16 Mei – 30 Mei 2018
3	Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	30 April - 18 Mei 2018
		8 November – 7 Desember 2018
4	Divisi Produk Dana dan Jasa	14 September - 21 September 2018
5	Divisi Manajemen Risiko	24 September - 28 September 2018
6	*Desk Service Quality*	13 September - 20 September 2018
7	Divisi Penanganan Kredit Bermasalah	21 September - 28 September 2018
8	Divisi Konsumer	23 Oktober - 26 Oktober 2018

9	Divisi Syariah	31 Oktober - 6 November 2018
10	Divisi Kepatuhan	1 November - 8 November 2018
11	Divisi Treasury & Internasional	9 November - 23 November 2018

Audit Tematik

No.	Audit Tematik	Auditee	Tanggal Pelaksanaan
1	Penetapan Suku Bunga Dasar Kredit	Tim ALCO	21 Maret – 27 Maret 2018
2	Kegagalan Sistem Pembayaran Menggunakan ATM/Kartu Debit	- Divisi Keuangan dan Operasional - Divisi Teknologi dan Sistem Informasi - Divisi Umum - Cabang Utama - Cabang Batam - Cabang Syariah Pekanbaru - Capem Panam	25 Juni - 6 Juli 2018

Audit Pendalaman

No.	Audit Pendalaman	Auditee	Tanggal Pelaksanaan
1	Penggunaan Beban	Cabang Batam	23 Juli – 27 Juli 2018

6. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan personil SKAI, maka kepada beberapa orang pegawai SKAI setiap tahunnya diikutsertakan dalam pendidikan, pelatihan, maupun seminar yang berkaitan dengan audit dan perkembangannya. Pada tahun 2018 ini pegawai SKAI telah mengikuti beberapa pelatihan dan seminar yang diadakan oleh lembaga pendidikan audit atau organisasi yang bergerak di bidang audit dengan pemberi materi yang telah berpengalaman. Materi pelatihan yang didapat dari kegiatan tersebut, nantinya akan disampaikan kepada auditor lainnya melalui mekanisme *"Sharing Moment"* sebagai bahan masukan dan pembelajaran untuk dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh auditor SKAI.

Program Pengendalian Mutu

SKAI memiliki program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya. Evaluasi tersebut terdiri dari :

1. Supervisi, dilakukan terhadap pekerjaan Auditor secara berkesinambungan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.
2. *Review Intern,* dilakukan terhadap Auditor SKAI secara berkesinambungan atas kualitas pekerjaan audit yang mereka hasilkan. Untuk tahun 2018, dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta obyektifitas atas pelaksanaan audit, SKAI

melalui Pemimpin SKAI dan atau Pemimpin Bagian Pengawasan telah melakukan tugas *Quality Assurance* (QA). Selain melaksanakan QA untuk menjaga mutu audit, SKAI juga melakukan edukasi dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit intern.

Quality Assurance

No	Keterangan	Pelaksanaan *Quality Assurance*
1	Auditor Cabang Syariah Pekanbaru	22 Maret - 23 Maret 2018
2	Auditor Cabang Utama	26 Maret - 27 Maret 2018
3	Auditor Cabang Pekanbaru	28 Maret - 29 Maret 2018
4	Auditor Cabang Bangkinang	26 Juni - 27 Juni 2018
5	Auditor Cabang Pangkalan Kerinci	28 Juni - 29 Juni 2018
6	Auditor Cabang Tanjung Pinang	26 November - 30 November 2018
7	Auditor Cabang Syariah Tanjung Pinang	26 November - 30 November 2018
8	Auditor Cabang Batam	26 November - 30 November 2018
9	Auditor Cabang Pasir Pangaraian	26 November - 30 November 2018
10	Auditor Cabang Siak Sri Indrapura	26 November - 30 November 2018
11	Auditor Cabang Dumai	26 November - 30 November 2018
12	Auditor Cabang Bagan Siapiapi	26 November - 30 November 2018
13	Auditor Cabang Bengkalis	09 Desember - 15 Desember 2018
14	Auditor Cabang Selat Panjang	09 Desember - 15 Desember 2018
15	Auditor Cabang Tanjung Balai Karimun	09 Desember - 15 Desember 2018
16	Auditor Cabang Jakarta	09 Desember - 15 Desember 2018
17	Auditor Cabang Ranai	09 Desember - 15 Desember 2018
18	Auditor Cabang Teluk Kuantan	16 Desember - 22 Desember 2018
19	Auditor Cabang Air Molek	16 Desember - 22 Desember 2018
20	Auditor Cabang Tembilahan	16 Desember - 22 Desember 2018

3. *Review Ekstern*, dilakukan terhadap Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) untuk menilai mutu kegiatan SKAI Bank Riau Kepri atas pelaksanan audit yang telah dilakukan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999, maka fungsi SKAI harus di-*review* oleh pihak ekstern minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Sampai saat ini, SKAI telah 5 (lima) kali di-*review* oleh pihak ekstern dengan urutan sebagai berikut :

Nama Akuntan Publik	Tahun	Untuk Periode
KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan	2016	2014 – 2016
KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan	2013	2011 – 2013
KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan	2010	2007 – 2010
KAP Drs. J. Tanzil & Rekan	2007	2004 – 2007
BPKP Riau	2004	2001 – 2004

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun 2018, Dewan Komisaris diberikan kewenangan oleh RUPS untuk menunjuk Auditor laporan keuangan Bank tahun buku 2018.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit melalui surat Komite Audit No. 015/KA-BRK/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018, menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan Bank Riau Kepri tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Selain penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) di atas, Dewan Komisaris berdasarkan hasil rekomendasi Komite Audit juga telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan untuk melaksanakan Audit Kepatuhan & Teknologi Sistem Informasi Bank Riau Kepri tahun 2018.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan merupakan akuntan publik yang terdaftar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) YANG MEMERIKSA BANK RIAU KEPRI TAHUN BUKU 2018			
Nama KAP	**Pimpinan Rekan**	**Izin Usaha**	**Alamat**
Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	Sriyadi, MM, CPA, BKP	Menteri Keuangan KEP. 140/KM.1/2012	Rukan Tanjung Mas Raya Blok B1 No. 22 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta 12530

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain bahwa KAP merupakan entitas yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan BAPEPAM-LK, tidak memiliki hubungan keuangan dengan Bank Riau Kepri, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank, tidak memberikan jasa lain kepada Bank Riau Kepri pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan, dan tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan Bank Riau Kepri lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut, serta mampu melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Profesi dan SPKN (Sistem Pemeriksaan Keuangan Negara).

Hasil audit Laporan Keuangan Bank Riau Kepri tahun 2018 yang telah disampaikan Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan mendapat opini "**Wajar Tanpa Pengecualian**".

Berikut disampaikan beberapa Kantor Akuntan Publik yang telah memeriksa laporan keuangan Bank Riau Kepri 5 (lima) tahun terakhir, sebagai berikut :

Nama Akuntan Publik	Tahun Buku	Penilaian
Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
Eka Masni, Bustaman & rekan	2015	Wajar Tanpa Pengecualian
Tjahjo, Machdjud Modopuro & rekan	2014	Wajar Tanpa Pengecualian

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bank Riau Kepri di dalam melakukan pengelolaan risikonya menerapkan 8 (delapan) jenis risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu : Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Stratejik.

Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *Road Map* Basel I dan Basel II serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai saat ini, Bank Riau Kepri senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan yang terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan, baik dari Bank Indonesia maupun dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Organisasi Manajemen Risiko

Organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di Bank Riau Kepri dipimpin oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Divisi Manajemen Risiko.

Kebijakan Manajemen Risiko

Bank senantiasa meningkatkan *Risk Awareness* dalam penerapan budaya sadar risiko yang terus diimplementasikan kepada seluruh karyawan pada setiap tingkatan dan pada setiap pelaksanaan aktivitas operasional dan non operasional perbankan.

Risiko adalah bagian dari bisnis Bank Riau Kepri. Bank mengidentifikasi, menilai, mengawasi, dan mengelola setiap jenis risiko, yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Bank telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Bank senantiasa melakukan penyempurnaan diberbagai bidang, antara lain peningkatan *risk awareness* dan penyempurnaan metodologi serta infrastruktur manajemen risiko. Bank memandang kedua hal tersebut merupakan hal penting dalam menerapkan manajemen risiko yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan kajian risiko terhadap :
   - *limit credit line* dengan *Bank Counterparty* dalam kerjasama *Money Market, Foreign Exchange* dan *Commercial Line*;
   - aktivitas Divisi Operasional, antara lain kajian risiko terhadap penambahan kas limit;
   - limit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet Berbasis *Chip;*
   - draft Surat Edaran Direksi tentang Penyaluran Kredit Aneka Guna;
   - draft perubahan Surat Edaran Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Aneka Guna (PAG) iB;

- draft Surat Keputusan Direksi tentang SOP dan Surat Edaran Direksi tentang Tabungan Sinar Pendidikan iB;
- penempatan loket Layanan Samsat pada Butik Bank Riau Kepri;
- *review* Penyertaan Modal PT. Sarana Riau Ventura;
- Rencana Alih Daya tahun 2019;
- draft Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran Direksi tentang Deposito iB *Mudharabah Muqayyadah*.

2. Melakukan advis terhadap :
   - kajian bisnis pengembangan fitur-fitur *Mobile Banking* (m-banking) Bank Riau Kepri;
   - perubahan *vendor* atas pengembangan fitur *Mobile Banking* (m-banking) Bank Riau Kepri;
   - perjanjian kerjasama KPR FLPP dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan PT. SMF;
   - perubahan klausul ahli waris pada SOP Tabungan;
   - pelaksanaan penarikan undian Tabungan Sinar;
   - draft Surat Edaran Direksi tentang Program Pemberian Ujrah dengan Akad Ju'alah dalam Pemasaran Tabungan iB Dhuha;
   - aktivitas Registrasi *Online* dan Aktivasi *Online* pada aplikasi *Mobile Banking* Bank Riau Kepri;
   - draft Surat Keputusan Direksi tentang SOP SIMA;
   - penetapan limit transaksi untuk *user* Aplikasi *Payment System* Non Tunai;
   - perubahan ketentuan suku bunga KAG khusus wilayah Pekanbaru;
   - rencana kerjasama Pialang Pasar Uang dengan *Broker* PT. Global Sarana Lintas Artha, PT. Tullet Prebon Indonesia, PT. Tradition Indonesia dan PT. Exco Nusantara Indonesia.
3. Melakukan Monitoring *Risk Appetite Statement* setiap bulan.
4. Melakukan sosialisasi pedoman budaya peduli risiko, implementasi penilaian risiko operasional, *assessment* risiko operasional dan penerapan *Businness Countinuity Plan*.
5. Melakukan simulasi tanggap darurat kebakaran pada kantor Cabang Pasir Pangaraian dan Cabang Tanjung Balai Karimun.

Laporan Profil Risiko

Trend Laporan Profil Risiko Bank Riau Kepri sepanjang tahun 2018 relatif stabil dengan peringkat Risiko Inheren *Low to Moderate* dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory,* sehingga menghasilkan peringkat risiko komposit secara keseluruhan adalah **Peringkat 2 *Low to Moderate***.

PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO			
Jenis Risiko	**Perangkat Risiko Inheren**	**Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko**	**Peringkat Tingkat Risiko**
Risiko Kredit	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Moderate	Satisfactory	2
Risiko Operasional	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Stratejik	Moderate	Fair	3
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	2
Peringkat Komposit			**2**

Peringkat komposit Profil Risiko merupakan kesimpulan akhir tingkat risiko Bank setelah memperhitungkan Risiko Inheren dan dengan mempertimbangkan mitigasi yang dilalukan melalui Penerapan Manajemen Risiko.

Penilaian Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dilakukan atas 8 (delapan) jenis risiko dan penetapan Peringkat Komposit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas masing-masing risiko.

Peringkat Komposit Profil Risiko Bank Riau Kepri adalah **2 (*Low to Moderate*)**. Risiko-risiko yang perlu menjadi perhatian utama bank adalah Risiko Likuiditas dan Risiko Strategik yang berada pada tingkat risiko *Moderate* dan kualitas penerapan manajemen risiko *Satisfactory* dan *Fair* dan untuk risiko-risiko lainnya tetap menjadi perhatian walaupun berperingkat lebih baik.

Risiko Likuiditas untuk rasio aset likuid primer dibandingkan aset likuid sekunder menurun dibanding periode sebelumnya, namun untuk menjaga likuiditas Bank telah aktif melakukan transaksi antar Bank dalam hal peminjaman dan melakukan Repo terhadap SDBI yang dimiliki.

Peningkatan dana relatif masih belum stabil dan belum sepenuhnya mengendap di Bank (Pendanaan Non Inti) serta DPK masih terkonsentrasi pada dana korporasi.

Risiko Stratejik diperlukan penetapan sasaran yang sesuai dengan kemampuan organisasi, perumusan strategi yang lebih *applicable* serta perlu dilakukan pemantauan secara ketat terhadap implementasi strategi dan pencapaian sasaran-sasaran usaha yang telah ditetapkan. Kualitas penerapan manajemen risiko stratejik dapat ditingkatkan melalui penyempurnaan pengendalian intern risiko stratejik.

Risiko lainnya yang masih perlu mendapat perhatian seperti Risiko Kredit yaitu perlu penajaman proses analisis kredit, peningkatan pengendalian intern melalui pengawasan oleh atasan langsung untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam proses pemberian kredit. Risiko Kepatuhan, masih terdapat kesalahan dalam pelaporan LHBU, LBU dan SLIK dan penyelesaian komitmen temuan yang sebagian masih belum memenuhi target waktu yang disepakati.

Beberapa risiko yang menjadi perhatian utama Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

Jenis Risiko	Faktor Penyebab
Risiko Likuiditas	a. Aset likuid primer dan sekunder menurun dibanding periode sebelumnya menjadi sebesar 5,85% dari total aset bank, yang disebabkan posisi penempatan antar bank neto mengalami peningkatan gap negatif menjadi sebesar Rp3.719 miliar. Kebijakan ini diambil dalam rangka *cover position* kebutuhan likuiditas Bank sedangkan untuk posisi SBI dan SDBI sebesar Rp Rp.2,3 triliun masih menghasilkan profitabilitas disamping juga sebagai *buffer*.
	b. Kredit Bank tidak terkonsentrasi kepada debitur inti namun tersebar lebih merata pada banyak debitur sehingga secara periodik terdapat kredit yang jatuh tempo atau dilunasi yang pada akhirnya akan menambah likuiditas bank. Hal ini dapat dilihat dari rasio 25 debitur inti sebesar 5,47% dari total kredit yang disalurkan. c. Bank perlu memberikan perhatian terhadap adanya konsentrasi pendanaan dari deposan inti. 50 deposan inti Bank memiliki 38,92% dari total DPK sehingga Bank harus mampu mengelola secara baik deposan inti, sehingga perlu diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi ketergantungan pada deposan inti d. Sampai dengan Desember 2018 volume transaksi rekening administratif mengalami penurunan menjadi sebesar 4,83%. Rekening administratif ini hanya bersifat penjaminan dalam bentuk Bank Garansi kepada rekanan Pemda dan kelonggaran tarik atas kredit sindikasi.
Risiko Stratejik	a. Kesesuaian Strategi Bank dengan kondisi lingkungan bisnis cukup memadai namun masih ada diantaranya perlu direview terutama metode dalam menentukan target dari rasio keuangan maupun proyeksi terhadap pos keuangan dalam *Corporate Plan*, Kebijakan Umum Direksi dan RBB. b. Strategi berisiko tinggi mencapai 40% sedangkan sisanya merupakan strategi berisiko rendah. c. Pangsa pasar aset Bank Riau Kepri dibandingkan rata-rata seluruh BPD mencapai 16,48% masih di atas rata-rata BPD, sedangkan untuk pencapaian laba, kredit dan DPK sebesar 8,75% di bawah rata-rata BPD. Sehingga bank masih harus lebih meningkatkan posisi *market* dan keunggulan kompetitif terhadap peer group maupun industri perbankan secara keseluruhan. d. Efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha bank belum cukup optimal, BOPO Bank Riau Kepri = 79,66% atau lebih tinggi dari rata-rata BOPO seluruh BPD = 77,18%. e. Perubahan kondisi ekonomi makro dan PMK 235 berdampak cukup signifikan terhadap bank dan pengurangan dana DBH. Bank masih harus terus berupaya meningkatkan penghimpunan dana non Pemda dari masyarakat dan korporasi.

Pengelolaan Risiko

Upaya-upaya Bank untuk mengelola risiko yang terjadi yaitu dengan menyusun Kebijakan, Prosedur dan Penetapan limit risiko yang memadai antara lain sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Direksi No. 077/KEPDIR/2018 tentang Komite Manajemen Risiko;
2. Surat Keputusan Direksi No.134/KEPDIR/2018 tentang Pedoman *Risk Appetite Statement* Bank Riau Kepri Tahun 2019;
3. Surat Keputusan Direksi No. 146/KEPDIR/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri; dan
4. Surat Keputusan Direksi No. 147/KEPDIR/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri nomor 48A/KEPDIR/2014 tentang Buku Petunjuk Penilaian Risiko Operasional PT Bank Riau Kepri.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan tanggung jawabnya, antara lain melakukan penilaian secara berkala, mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Bank Riau Kepri serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

Sepanjang tahun 2018, pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut :

PELAKSANAAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	
Direksi	**Dewan Komisaris**
1. Melakukan kajian terkait dengan kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan termuat di dalam BPP Manajemen Risiko. 2. Melakukan kajian risiko terhadap rencana dan pelaksanaan aktifitas operasional bank yang dilakukan oleh seluruh unit bisnis. Menyusun dan melampirkan laporan Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko Bank. 3. Menyusun dan melampirkan laporan Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko Bank. 4. Melakukan Kajian terkait wewenang limit transaksi, wewenang limit kas. 5. Melakukan *review* Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (11 Buku). 6. Melakukan *review* kebijakan sertifikasi	1. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). 2. Mengawasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko terutama terkait dengan pengelolaan risiko kredit dan risiko likuiditas.

Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat PT Bank Riau Kepri. 7. Melakukan *review* Kebijakan Komite Manajemen Risiko. 8. Membuat Kebijakan Buku Petunjuk Penilaian Risiko Operasional. 9. Menyusun kebijakan *Risk Appetite Statement* tahun 2019. 10. Monitoring kebijakan Manajemen Risiko, budaya peduli risiko, implementasi penilaian risiko operasional, assessment risiko operasional dan penerapan *Businness Countinuity Plan.*	

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Sistem Informasi Manajemen Risiko yang ada cukup mampu secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank. Sistem pengendalian intern yang memadai telah diterapkan secara menyeluruh. Kedepan kebijakan dan prosedur yang digunakan tersebut akan terus dilakukan review dan pengujian terhadap kebijakan dan produk Bank sesuai dengan kompleksitas, dan ketentuan yang berlaku.

Untuk tahun 2018, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang dilakukan adalah dengan menerbitkan *Risk Appetite Statement* tahun 2018 sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Direksi No. 105/KEPDIR/2017 tentang Kebijakan *Risk Appetite Statement* Tahun 2018.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Satuan kerja manajemen risiko melakukan identifikasi risiko dengan melakukan kajian dan review terhadap setiap produk Bank guna memberikan gambaran terkait risiko-risiko yang dapat terjadi di kemudian hari.

Pengukuran dan pemantauan risiko dilakukan dalam bentuk *risk self assesment* disetiap kantor Cabang yang selanjutnya disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko secara *online*, sebagai bahan monitoring seluruh Cabang dan evaluasi manajemen dalam penetapan kebijakan manajemen risiko.

Hasil monitoring *risk self assesment* dianalisis dan dibuat laporan oleh Divisi Manajemen Risiko secara triwulanan dan menyampaikan laporan tersebut ke unit kerja terkait, Direksi dan Komisaris termasuk kepada pihak eksternal terkait lainnya.

Bank telah memiliki proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dihadapi.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Bank sangat berhati-hati dalam melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait, sehingga porsi kredit kepada pihak terkait dalam total kredit yang diberikan Bank relatif sedikit.

Prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang dilakukan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006.

Secara umum Bank telah memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait yang disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rentang waktu selama tahun 2018, Bank tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK. Untuk pelaksanaan kewajiban laporan, Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal BMPK dimaksud di atas secara konsekwen dan tepat waktu. BMPK Bank Riau Kepri periode Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT		
Konvensional	**Syariah**	**Keterangan**
Nominal (dalam jutaan Rp)	Nominal (dalam jutaan Rp)	
578.479 (1 Peminjam) 723.099 (1 Kelompok Peminjam)	---	Untuk perhitungan BMPK Syariah masih masuk di dalam perhitungan BMPK Konvensional

Tabel di bawah ini menjelaskan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup di Bank Riau Kepri periode per Desember 2018 :

No	**Penyediaan Dana**	**Jumlah**	
		Debitur	**Nominal (dalam jutaan Rp)**
1	Kepada Pihak Terkait	1	234.131.709
2	Kepada debitur inti : a. individu b. group	25 15 10	909.647.283.429 39.690.259.423 869.957.024.006

RENCANA STRATEGIS BANK

Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh Bank

Langkah-langkah Strategis *(Inisiatif Strategic)* yang menjadi fokus Bank tahun 2018 antara lain adalah :

1. Rencana Pendanaan

   a. Implementasi *Digital Solution* Bank (*SMS Banking menu-based*, uang elektronik *server-based*, *Internet Banking Personal*, *Internet Banking* Korporasi (*Cash Management System*), dan *Virtual Account*) dengan fokus utama melayani segmen retail yang akan terus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi keuangan dan pembayaran, sehingga dapat menguntungkan dan memudahkan nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan;

   b. Pengembangan kerjasama bisnis dengan nasabah dan prospek potensial nasabah institusi (Dana BOS, Dana Sertifikasi Guru, Gaji Honorer, Gaji Pensiunan) maupun pendekatan kepada komunitas;

   c. Peningkatan *engagement* dan *customer loyalty* melalui layanan *priority banking*;

   d. Penguatan program promosi melalui program undian, *merchant discount*, even-even dan *customer gathering*;

   e. Peningkatan kompetensi *frontliner* melalui pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dengan *learning center*;

   f. *Review pricing* produk dana dan jasa dalam rangka peningkatan layanan kepada nasabah dan suku bunga ditetapkan bersaing serta menarik dengan memperhatikan kondisi internal Bank Riau Kepri serta pasar (waktu dan momen yang tepat);

   g. Implementasi Aplikasi ALMA;

   h. Memperluas jangkauan layanan perbankan tanpa kantor melalui kerjasama Agen Laku PandaiPenyaluran Kredit.

2. Rencana Penanaman Dana

   a. Mengembangkan kredit UMKM berbasiskan GCG dengan fokus prioritas kepada UMKM di daerah pesisir dan nelayan serta percepatan *replanting* di bidang UMKM perkebunan;

   b. Peningkatan kredit MKM (Mikro, Kecil dan Menengah) melalui kerjasama dengan Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) dan penyaluran kredit replanting kelapa sawit melalui *sharing* dana dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kerjasama dengan perusahaan (*First Resource* Group) untuk penyaluran kredit konversi kepemilikan kebun kelapa sawit serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR);

   c. Implementasi Skim Kredit Usaha Mikro Merdu Sejahtera;

   d. Meningkatkan pertumbuhan kredit Komersial melalui prioritas pada pembiayaan pinjaman sindikasi yang dikoordinir oleh Bank BUMN terkait program infrastruktur di Indonesia serta program pembangunan lainnya, dan fokus menumbuhkembangkan pembiayaan berbasiskan investasi dalam koridor GCG di wilayah Riau dan Kepulauan Riau;

   e. Meningkatkan pertumbuhan kredit konsumer melalui penerapan strategi komunikasi yang efektif dan intensif serta pelayanan yang optimal terhadap ASN, dan menunjang penuh program penyediaan kebutuhan rumah oleh Pemerintah melalui KPR;

   f. Optimalisasi fungsi *relationship officer* (RO) dalam rangka pemasaran produk-produk kredit dengan menggunakan metode *pipeline*;

g. Merealisasikan kredit kepada SKPD yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh dalam bentuk modal kerja maupun investasi seperti rumah sakit, universitas dan lain-lain;

h. Promosi secara *below the line* dan *above the line*, antara lain *customer gathering*, *exhibition* produk, pemberian anugerah kepada UMKM sukses, melakukan pembinaan UMKM, serta peliputan usaha debitur sukses melalui media TV;

i. Melakukan *review* kebijakan kredit terkait suku bunga, model dan metode pembayaran angsuran kredit, agunan, pengikatan agunan dan dalam rangka antisipasi persaingan;

j. Mengoptimalkan instrumen-instrumen investasi pengelolaan dana dalam bentuk *money market, fixed income* dan *Forex*/ transaksi valas;

k. Mengimplementasikan aplikasi analisa keuangan komersial untuk mempercepat proses analisa (SLA) dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta meningkatkan kapabilitas RO dalam menyalurkan kredit komersial;

l. Melakukan *review* BPP dan Kebijakan Perkreditan Segmen Komersial untuk memberikan skema kredit yang kompetitif dan menarik bagi nasabah dan calon nasabah, khususnya pada sektor konstruksi;

m. Implementasi KPR *Center*.

3. Rencana Permodalan

Upaya peningkatan moda Bank Riau Kepri dilakukan melalui pendekatan kepada pemegang saham baik melalui penyampaian pada saat pelaksanaan RUPS maupun pendekatan yang dilakukan secara langsung kepada Pemprov, Pemkab, dan Pemko. Diharapkan tambahan setoran modal berasal dari pengembalian dividen, maupun setoran tunai dari Kas Daerah.

4. Rencana Pengembangan Organisasi

Rencana pengembangan organisasi Bank Riau Kepri dilakukan melalui perubahan struktur organisasi yang mendukung kebijakan strategis Bank Riau Kepri dalam memperkuat fungsi *digital banking*. Penambahan *delivery channel* berupa jaringan kantor, agen Laku Pandai dan sarana elektronik lainnya untuk memaksimalkan pertumbuhan DPK *low cost fund*, kredit produktif dan *fee-based income*.

5. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

a. Pengadaan perangkat *security (firewall)*;

b. Pengadaan dan Implementasi penggunaan KTP-el *Reader*;

c. Penggantian *Server* DRC;

d. Pemenuhan kebutuhan Lisensi Microsoft;

e. *Rollout* penggunaan *Finger Print* di seluruh unit operasional;

f. Pengadaan *backup hardware network & Server;*

g. *Penetration Test Security*;

h. Pembangunan gedung *Data Center*

6. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. CPM berbasiskan *talent management*;

b. *Training* terprogram dan non terprogram (atas permintaan unit kerja);

c. Diklat penjenjangan karir mulai dari *Officer Development Program* (ODP), *Staff Development Program* (SDP), *Manager Development Program* (MDP), hingga *Executive Development Program* (EDP);

d. Pengembangan Program Diklat dan pembentukan *Learning Center*;

e. Pencanangan Bank Riau Kepri *University*;

f. Survey Kepuasan Pegawai ;

g. Pembenahan *database* Kepegawaian meliputi integrasi data pengembangan pegawai dan digitalisasi arsip kepegawaian ;

h. Implementasi kepemilikan saham oleh pegawai maupun pengurus bank (MSOP/ESOP);

i. Penyempurnaan *individual performance management system*;

j. Penyempurnaan sistem remunerasi;

k. Pengembangan *e-learning*;

l. Implementasi perubahan status pegawai Tidak Tetap (*Core* maupun *Non Core*) secara bertahap;

m. Rekrutmen Pegawai Tetap sesuai kebutuhan;

n. Implementasi beasiswa pendidikan S2 dan S3 keluar negeri bagi pegawai.

7. Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru

Produk Baru	Aktivitas Baru
1. Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*	1. Bancassurance
2. Pembiayaan Komersial iB *Mudharabah Muqayyadah*	2. SMS Banking *Menu-Based/USSD*
3. Deposito *Mudharabah Muqayyadah*	3. Uang Elektronik *Server-Based*
4. Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA)	4. Uang Elektronik *Card-Based* (*Co-branding*)
5. Tabungan iB Sinar Pendidikan	5. *Internet Banking*
	6. *Cash Management System*
	7. *Priority Banking*
	8. KPR *Center*
	9. *Call Center*
	10. Debit ATM sebagai *Issuer* (Pemilik Kartu) dan *Acquairer* (Pemilik Mesin)

8. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Untuk tahun 2018 Bank Riau Kepri merencanakan pembukaan 2 (dua) Kantor Cabang Pembantu setingkat, 7 (tujuh) Kantor Kas, 10 (sepuluh) kas keliling/*otobanking*, 6

(enam) *payment point*, 160 (seratus enam puluh) ATM/CRM, 200 unit mesin EDC, 8 (delapan) relokasi kantor, relokasi 10 (sepuluh) unit ATM dan 2 (dua) unit ULS serta 1 (satu) kantor perubahan status.

9. Penyelesaian Kredit Bermasalah

   a. Penagihan intensif dengan menurunkan personil Divisi Penanganan Kredit Bermasalah dan Tim *Task Force* dalam membantu upaya penagihan kredit ke unit kerja yang memiliki kredit bermasalah;

   b. Melaksanakan restrukturisasi kredit bila memungkinkan;

   c. Melaksanakan klasifikasi agunan yang memungkinkan untuk dijual dibawah tangan atau melalui lelang eksekusi oleh KPKNL;

   d. Melakukan sosialisasi Website Penjualan Agunan dalam rangka percepatan penjualan agunan;

   e. Melaksanakan hapus buku secara periodik;

   f. Menjalin kerjasama dengan Divisi Komersil, Divisi Konsumer, Divisi MKM dan Divisi Syariah untuk melakukan pengendalian kredit dengan kualitas lancar agar tidak turun menjadi kredit bermasalah;

   g. Melakukan *review* kebijakan yang berhubungan dengan penanganan kredit bermasalah sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan;

   h. Pengembangan sistim penanganan kredit bermasalah;

   i. Melaksanakan kerjasama penagihan kredit dengan pihak eksternal.

Rencana Jangka Pendek

1. Peningkatan fungsi intermediasi

   a. Pertumbuhan DPK dilakukan melalui strategi :

      - Implementasi Digital Solution Bank Riau Kepri (*SMS Banking menu-based*, Uang elektronik *server-based*, Uang elektronik *card-based (Co-branding)*, *Internet Banking Personal*, *Internet Banking* Korporasi, Aplikasi Transaksi Non Tunai, *Virtual Account*);
      - Perluasan Jaringan Agen Laku Pandai;
      - Melakukan dan mengembangkan kerjasama bisnis dengan nasabah dan prospek potensial nasabah institusi (Dana BOS, Sertifikasi Guru, Gaji Honorer, Gaji Pensiunan);
      - Meningkatkan *engagement* dan *customer loyalty* melalui layanan *priority banking*;
      - Penguatan program promosi melalui program undian, *discount merchant*, even-even, dan *customer gathering*;
      - Peningkatan kompetensi *frontliner* melalui Diklat.

   b. Di bidang penyaluran kredit, strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

      - Pengembangan Skim Kredit Usaha Mikro Merdu Sejahtera;

- Program pengembangan UMKM sektor Perkebunan Kelapa Sawit, Sagu, Kelapa, Perikanan Air Tawar dan Pariwisata;
- Mengimplementasikan aplikasi analisa keuangan komersial untuk mempercepat proses analisa (SLA) dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta meningkatkan kapabilitas RO dalam menyalurkan kredit komersial;
- Melakukan *Review* BPP dan Kebijakan Perkreditan Segmen Komersial untuk memberikan skema kredit yang kompetitif;
- Implementasi KPR *Center*;
- Perluasan pangsa pasar melalui kredit kepada pensiunan.

2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional

   Adapun strategi yang akan dilaksanakan guna mendukung operasional yang efektif dan efisien adalah :

   - Penyempurnaan Aplikasi BI *Report*;
   - Aplikasi Penyelesaian "*suspect*" transaksi ATM;
   - Pengembangan Aplikasi Monitoring & Rekonsiliasi ATM;
   - Implementasi *Call Center*;
   - Penguatan fungsi *learning center* untuk membentuk insan Bank Riau Kepri yang berwawasan luas dan handal;
   - Melakukan *update* dan *upgrade* kompetensi pegawai secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan bisnis;
   - Peningkatan tata kelola diklat melalui pemerataan diklat bagi seluruh Pegawai;
   - Penerapan SKI sebagai upaya agar pegawai menjalankan tugasnya secara optimal, meningkatkan loyalitas dan mengarahkan persaingan kinerja ke arah iklim terbuka dan positif.

3. Penurunan kredit bermasalah

   Strategi penurunan NPL yang akan dilakukan adalah :

   - Penyusunan *database* kredit bermasalah;
   - Penagihan kredit bermasalah secara intensif;
   - Pemenuhan kebutuhan tenaga penagih kredit bermasalah di unit kantor dengan nominatif NPL tinggi;
   - Lelang agunan kredit bermasalah;
   - Pemberian insentif penagihan dan *reward* kepada unit kantor dengan kinerja sangat baik dalam penyelesaian NPL.

4. *Governance, Risk* dan *Compliance* (GRC)

   Strategi yang akan ditempuh Bank Riau Kepri di bidang *governance, risk* dan *compliance* (GRC) adalah :

   - Otomasi Monitoring Indikator *Contigency Funding Plan* (CFP);
   - Sistem Monitoring Audit;

- Perubahan Parameter Aplikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- Aplikasi Warning Transaksi *High Risk Customer &Politically Exposed Person.*
- Aplikasi Transaksi Khusus Intern.
- Aplikasi *Whistle Blowing.*
- Penyempurnaan Aplikasi Pengkinian Data Nasabah.
- Melaksanakan sosialisasi atas risiko kepatuhan (*Risk Compliance Awareness*).

5. Pengembangan Teknologi Informasi

- Penguatan infrastruktur teknologi informasi (Peningkatan Kapasitas *Server* DRC AS400, Perangkat *Firewall*, Penggunaan E-KTP *Reader* dalam transaksi);
- Penguatan fungsi IT Security;
- Percepatan Integrasi *switching* ATM BPD SI;
- Pembangunan *Data Center*;
- Melengkapi kebijakan dan prosedur untuk peningkatan GCG di bidang TI;
- Pengembangan teknologi informasi untuk mendukung pengembangan produk/layanan Bank Riau Kepri;
- *Delivery Channel & Service Quality;*
- Penambahan *delivery channel* : Agen Laku Pandai, Terminal ATM/CRM, Layanan Kas Keliling (*Otobanking/Mini Otobanking*) dan Pembukaan jaringan kantor Konvensional dan Syariah;
- Penyempurnaan BPP Kualitas Layanan;

6. Pengembangan Usaha Syariah

Dalam pengembangan unit usaha syariah dilaksanakan strategi sebagai berikut :

a. Menurunkan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) atau rasio pembiayaan bermasalah (*recovery* pembiayaan bermasalah) menjadi sebesar 3,50%, dengan langkah-langkah:
   - Penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui Tim dengan penugasan khusus (Tim *Task Force*) untuk kantor dengan NPF di atas 5%;
   - Menyusun dan membuat pola penyelesaian (mapping) seluruh pembiayaan bermasalah dan hapus buku;
   - Melakukan penertiban dokumen aspek legal/hukum agunan dalam rangka proses lelang agunan;
   - Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan kompetensi petugas dan pejabat terkait dalam penanganan pembiayaan bermasalah;
   - Melakukan upaya penjualan aset yang diagunkan pada pembiayaan bermasalah yang memiliki baki debet yang besar.

b. Penyaluran pembiayaan tumbuh sebesar Rp445 miliar dari tahun lalu.

c. Kualitas pembiayaan terjaga dengan baik dan terus ditingkatkan.

d. Nasabah yang mempunyai fasilitas pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan sehingga kualitas pembiayaan semakin baik.

e. Meningkatkan pembiayaan produktif dengan melakukan review dan refreshment produk-produk pembiayaan produktif untuk mengakomodir kebutuhan pasar dan kebijakan asuransi dan penjaminan pembiayaan.

f. Meningkatkan fungsi intermediasi.

g. Penghimpunan DPK syariah menjadi Rp2,05 triliun.

h. Meningkatkan efisiensi.

Rencana Jangka Menengah

1. Peningkatan modal dengan memanfaatkan dukungan Pemegang Saham Pengendali, sehingga daya saing Bank Riau Kepri meningkat.
2. Mendorong inovasi produk dan perluasan ragam layanan berbasis digital banking untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkokoh citra Bank Riau Kepri di mata nasabah serta meningkatkan pendapatan Bank.
3. Memperluas *delivery channel* melalui pengembangan *e-channel* sejalan dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap *e-banking* dan untuk memperkuat posisi Bank Riau Kepri sebagai Bank pilihan bagi masyarakat Riau dan Kepulauan Riau.
4. Memperkuat *platform* Unit Usaha Syariah, yaitu :
   - Meningkatkan jumlah aset mencapai Rp4,6 triliun;
   - Peningkatan jumlah pembiayaan menjadi Rp2,8 triliun;
   - Peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga menjadi Rp3 triliun;
   - Perluasan jaringan distribusi antara lain dilakukan melalui penambahan jaringan kantor, ATM, CDM, *Mobile* EDC, dan *Oto Banking*;
   - Peningkatan kualitas pelayanan antara lain dilakukan melalui pembenahan CIF (*Customer Information File*) serta peningkatan fungsi *Service Quality* pada masing-masing kantor;
   - Meningkatkan fungsi tata kelola perusahaan (GCG) berbasis syariah dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah;
   - Meningkatkan fungsi tata kelola perusahaan (GCG) berbasis syariah dengan mengoptimalkan fungsi Direktur dan Komisaris;
   - Membudayakan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yaitu: *Transparancy, Accountable, Responsible, Independence* dan *Fairness* serta menjadikan Pegawai Bank bekerja berdasarkan Kode Etik GCG;
   - Penguatan Internal Kontrol antara lain dilakukan melalui penyempurnaan sistem *Risk Based Audit* serta penerapan *Audit Rating System*, penguatan fungsi IT Auditor, dan penguatan fungsi *Internal Control* Cabang;
   - Penguatan Manajemen Risiko antara lain dilakukan melalui pengembangan dan implementasi aplikasi Rating Nasabah Pembiayaan, Laporan Profil Risiko, Laporan

Tingkat Kesehatan Bank, Pemantauan Likuiditas, dan pengembangan database permasalahan internal untuk mendukung penerapan *Operation Risk Management*;

- Untuk memperkecil tingkat NPF antara lain dilakukan melalui perbaikan proses kerja dan peningkatan kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, perbaikan mekanisme penagihan pembiayaan, kerja sama dengan KPKNL untuk penyelesaian/pelelangan agunan dan penyempurnaan dalam rangka melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang terintegrasi dengan *core banking system*;
- Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi akan disesuaikan berdasarkan hasil rekomendasi konsultan IT setelah mendapatkan persetujuan Direksi dalam penerapannya.

5. Menjadikan Tingkat Kesehatan yang baik sebagai salah satu faktor untuk memenangkan persaingan antar bank, melalui penguatan citra dan kepercayaan Bank di mata nasabah.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Bank Riau Kepri telah mentransparansikan informasi produk dan layanan Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Penerapan mengenai transparansi informasi produk Bank saat ini telah dapat diketahui nasabah melalui berbagai media komunikasi antara lain seperti :

1. Website Bank Riau Kepri (www.bankriaukepri.co.id)
2. Brosur/leaflet dan iklan
3. Pengumuman yang dipasang/disebarkan di jaringan kantor-kantor Cabang Bank
4. Penjelasan lisan dari petugas *frontliner* Bank

Terkait kebijakan transparansi, Bank saat ini telah memiliki Ketentuan Direksi tentang Transparansi Produk Bank, sebagaimana tertuang di dalam SK Direksi No. 13/KEPDIR/2006 tanggal 01 Februari 2006 tentang Kebijakan Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Bank Riau.

Untuk kebijakan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan melekat di masing-masing kewajiban pelaporan Bank, seperti laporan LBU, LHBU, Laporan tahunan dll.

Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para *Stakeholders* termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia/OJK dan para *Stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan disesuaikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Hal tersebut dilakukan dengan tepat waktu, dan lengkap sesuai yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Bank Indonesia dan OJK.

Salah satu bentuk pengungkapan transparansi kondisi keuangan Bank antara lain sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank maupun pada lembaga keuangan bukan Bank, Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
3. Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan disajikan pada *Home Page* Bank Riau Kepri.

KEPEMILIKAN SAHAM DAN *SHARES OPTION*

Bank Riau Kepri merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang perbankan dengan kepemilikan saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah kota dan kabupaten yang berada di wilayah Riau dan Kepri.

Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki saham pada Bank Riau Kepri, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Propinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Selama dan dalam periode pelaporan tahun 2018 Bank Riau Kepri tidak memiliki opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan yaitu apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah).

Sepanjang tahun 2018 terdapat 5 (lima) penyimpangan internal (*internal fraud*) yang terjadi di Bank Riau Kepri dengan indikasi kerugian lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah penyimpangan internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Internal *Fraud* dalam 1 tahun	**Jumlah Kasus Yang Dilakukan :**					
	Pengurus		**Pegawai Tetap**		**Pegawai Tidak Tetap**	
	Tahun 2017	**Tahun 2018**	**Tahun 2017**	**Tahun 2018**	**Tahun 2017**	**Tahun 2018**
Total *Fraud*	-	-	3	5	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	1	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	3	4	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

PERMASALAHAN HUKUM

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum, selama periode tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah		
	PHI	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/Upaya Perdamaian)	1	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	6	5
Total	1	6	5

Dari total 12 (sebelas) permasalahan hukum yang dihadapi Bank, 11 (sebelas) diantaranya masih dalam proses penyelesaian dan 1 (satu) permasalahan hukum telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu 1 (satu) permasalahan hubungan industrial. Dari beberapa permasalahan hukum tersebut, beberapa diantaranya telah mendapat putusan Pengadilan Negeri setempat, namun Penggugat ataupun Tergugat dalam permasalahan hukum tersebut mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi.

BUY BACK SHARES DAN *BUY BACK* OBLIGASI BANK

Pada tahun 2011 Bank menerbitkan Obligasi I dengan nilai sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2016.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi.

Sampai saat ini Bank belum pernah melakukan *buy back shares dan buy back* atas obligasi yang diterbitkan oleh Bank.

UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

Dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Riau Kepri berkomitmen dalam melaksanakan GCG di seluruh aspek yang dimiliki dengan berlandaskan pada 5 prinsip dasar *Good Corporate Governance.* Dalam pelaksanaan GCG, perlu dilakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan *stakeholders* khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas.

Laporan Pelaksanaan GCG ini disusun berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sebagai Bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, maka dalam hal pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk dan berkantor di UUS . DPS bersifat tidak terikat oleh UUS, pengangkatan DPS harus memiliki rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah.

Sesuai ketentuan PBI No. 11/10/PBI/2009, bahwasanya jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dan DPS dipimpin oleh 1 (satu) orang yang ditunjuk dari anggota DPS.

DPS PT. Bank Riau Kepri terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Dr. H. Suryan Al Jamrah,MA (ketua) dan Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA (anggota). Kedua anggota DPS tersebut diangkat pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.15/5/DPbS/PAdBS/Pbr dan Surat Rekomendasi DSN-MUI No.U-400/DSN-MUI/XI/2011.

Kedua anggota DPS tersebut menjabat sebagai ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah selama (empat) tahun terhitung tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan 13 Februari 2017 Diperpanjang untuk 4 (empat) tahun kedepan mulai tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 13 Februari 2021 sebagaimana tertuang dalam berita acara RUPSLB No.11 Tanggal 09 Februari 2018 dihadapan Notaris Pupung Mulyantini, SH.MH.

Berikut susunan DPS Bank Riau Kepri :

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Surat Rekomendasi DSN-MUI	Surat Keputusan Bank Indonesia	Masa Jabatan
1.	Dr. H. Suryan Al Jamrah,MA	Ketua	SK Direksi PT. Bank Riau Kepri No.23/KEPDIR/2013	Surat No. U-400/DSN-MUI/XI/2011	Surat No. 15/5/DPbS/PAd BS/Pbr	Tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan 13 Februari 2017 dan diperpanjang sampai 4 (empat) tahun terhitung tgl 13 Februari 2017 sampai dengan 13 Febuari 2021
2.	Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA	Anggota	SK Direksi PT. Bank Riau Kepri No.23/KEPDIR/2013	Surat No. U-400/DSN-MUI/XI/2011	Surat No. 15/5/DPbS/PAd BS/Pbr	

Adapun masa jabatan DPS selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2013 sebagaimana tertuang dalam akta RUPSLB Nomor 19 yang dibuat dihadapan Notaris Refizal,SH.,MHum dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 23/KEPDIR/2013 tanggal 26 Februari 2013. Diperpanjang untuk 4 (empat) tahun kedepan mulai tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 13 Februari 2021 sebagaimana tertuang dalam berita acara RUPSLB No.11 Tanggal 09 Februari 2018 dihadapan Notaris Pupung Mulyantini, SH.MH.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk UUS yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pedoman Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Direksi Bank Riau Kepri telah menerbitkan SK Direksi Nomor 09/KEPDIR/2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri yang terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I : Berisi mengenai pendahuluan dan latar belakang penyusunan, dasar hukum, serta pengertian-pengertian

Bab II : Berisi uraian mengenai DPS secara kelembagaan, menyangkut ketentuan mengenai kedudukan DPS, persyaratan anggota DPS, tugas dan tanggung jawab DPS, mekanisme penetapan anggota DPS, jumlah dan perangkapan keanggotaan DPS, rapat DPS, masa jabatan DPS, serta hak dan fasilitas anggota DPS dan ketentuan lainnya.

Bab III : Pedoman pengawasan dan tata cara pelaporan DPS, berisi tentang mekanisme pelaksanaan pengawasan DPS terhadap proses pengembangan produk baru dan terhadap kegiatan Unit Usaha Syariah serta tata cara pelaporan DPS.

Bab IV : Objek material pengawasan DPS, berisi materi-materi bermuatan syariah dalam seluruh kegiatan operasional termasuk produk dan jasa Unit Usaha Syariah dengan berpedoman kepada fatwa DSN-MUI dan sesuai prinsip-prinsip umum syariah.

Bab V : Lampiran-lampiran.

Selama tahun 2017 DPS Bank Riau Kepri telah melakukan aktivitas dan rapat yang merupakan realisasi dari tugas dan tanggung jawab DPS.

Opini dan Aktivitas Dewan Pengawas Syariah

Realisasi tugas dan tanggung jawab dalam hal menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS, DPS telah mengeluarkan pernyataan atas ketaatan UUS PT. Bank Riau Kepri terhadap pelaksanaan prinsip syariah untuk laporan keuangan tahun buku 2018, pernyataan ini dilampirkan di Laporan Aktifitas DPS yang dilaporkan per semester pada tahun 2018.

Realisasi tugas dan tanggung jawab DPS dalam hal mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk dan memberikan opini syariah adalah DPS ikut mengawasi selama proses pembuatan produk baru UUS dengan mengadakan rapat koordinasi antara Divisi UUS dan Kantor Cabang Syariah.

Realisasi tugas dan tanggung jawab DPS dalam hal meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya, UUS PT. Bank Riau Kepri telah memenuhi semua permintaan data yang diminta oleh DPS, baik pada saat proses audit yang rutin atau permintaan yang bersifat insidentil.

Sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS, DPS melakukan pengawasan terhadap Bank dan terhadap penerbitan produk dan aktifitas baru maka DPS dalam hal ini memberikan opini/pendapat, apakah telah sesuai dengan Prinsip Syariah. Pendapat dimaksud disampaikan dalam bentuk opini dan Surat Keterangan Dewan Pengawas Syariah.

Untuk tahun 2018 DPS PT. Bank Riau Kepri telah memberikan opini sebagai berikut:

1. Opini Nomor 01/DPS-BRKS/2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma') PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah.
2. Opini Nomor 02/DPS-BRKS/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah dengan Metode Annuitas pada UUS Bank Riau Kepri.
3. Opini Nomor 03/DPS-BRKS/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Penetapan Larangan *Take Over* dari Bank Riau Kepri Konvensional ke UUS Bank Riau Kepri tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Opini Nomor 04/DPS-BRKS/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Penerbitan Perubahan Kebijakan Produk Pembiayaan Ulang Syariah (*Refinancing* iB).
5. Opini Nomor 05/DPS-BRKS/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Pemberian Ujrah dengan Akad Ju'alah dalam Pemasaran Tabungan iB Dhuha.
6. Opini Nomor 06/DPS-BRKS/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Sertifikat Investasi Antar Bank (SIMA).
7. Opini Nomor 07/DPS-BRKS/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Penerbitan Produk Tabungan Pendidikan iB.
8. Opini Nomor 08/DPS-BRKS/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Kebijakan Produk Mudharabah Muqayyadah (MMoB).
9. Opini Nomor 09/DPS-BRKS/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Kebijakan Produk Tabungan dhuha.

Dapat disampaikan juga DPS PT. Bank Riau Kepri telah melaporkan Laporan Semester I dan Semester II Hasil Pengawasan DPS tahun 2018 secara tepat waktu ke Otoritas Jasa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Direksi PT. Bank Riau Kepri, Komisaris PT. Bank Riau Kepri dan Dewan Syariah Nasional – MUI, hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Realisasi kegiatan yang telah disebutkan di atas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kegiatan DPS selama tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

No.	Tanggal	Aktivitas DPS	Tempat	Keterangan
1	10 Januari 2018	Rapat rutin dan penentuan jadwal pengawasan semester II	Ruang rapat lt.11 MDM Bank Riau Kepri	Ketua DPS dan Staff Divisi Syariah
2	22 Januari 2018	Pengawasan DPS ke KCPS Tg Balai Karimun	KCPS Tg Balai Karimun	Anggota DPS dan Staff Divisi Syariah serta Pemimpin KCPS
3	23 Januari 2018	Pengawasan DPS ke KCPS Panam	KCPS Panam	Anggota DPS dan Staff Divisi Syariah serta Pemimpin KCPS
4.	24 Januari 2018	Pengawasan DPS ke KCS Pekanbaru	KCS Pekanbaru	Anggota DPS dan Staff Divisi Syariah serta Pemimpin KCS
5	24 Januari 2018	Pengawasan DPS ke KCPS Tembilahan	KCPS Tembilahan	Ketua DPS dan Staff Divisi Syariah serta Pemimpin KCPS
6	25 Januari 2018	Pengawasan DPS ke KCPS Taluk Kuantan	KCPS Taluk Kuantan	Ketua DPS dan Staff Divisi Syariah serta Pemimpin KCPS
7	29 Januari 2018	Pengawasan DPS ke KCS Tanjung Pinang	KCS Tanjung Pinang	Anggota DPS dan Staff Divisi Syariah serta Pemimpin KCS
8	29 Januari 2018	Pengawasan DPS ke KCPS Duri	KCPS Duri	Ketua DPS dan Staff Divisi Syariah serta Pemimpin KCPS
9	5 Februari 2018	Pengawasan DPS ke KCPS Batam	KCPS Batam	Ketua DPS dan Staff Divisi Syariah serta Pemimpin KCPS
10	6 Juni 2018	Rapat dengan Divisi Syariah terkait pembiayaan sindikasi	Ruang Rapat Lt 11 MDM BRK	DPS,Divisi bisnis Syariah dan Divisi Operasional & Perencanaan Syariah
11	12 Juli 2018	Rapat penentuan jadwal pengawasan semester II	Ruang Rapat Lt 11 MDM BRK	DPS dan Divisi Operasional & Perencanaan Syariah
12	23 Juli 2018	Pengawasan DPS ke KCPS Tembilahan	KCPS Tembilahan	Ketua DPS dan Staff Divisi Operasional & Perencanaan Syariah serta Pemimpin KCPS
13	27 Juli 2018	Pengawasan DPS ke KCPS Panam	KCPS Panam	Ketua DPS dan Staff Divisi Operasional & Perencanaan Syariah serta Pemimpin KCPS
14	30 Juli 2018	Pengawasan DPS ke KCPS Duri	KCPS Duri	Anggota DPS, Staff Divisi Operasional & Perencanaan Syariah dan Pemimpin KCPS

15	1 Agustus 2018	Pengawasan DPS ke KCS Pekanbaru	KCS Pekanbaru	Ketua DPS dan Staff Divisi Operasional & Perencanaan Syariah serta Pemimpin KCS
16	6 Agustus 2018	Pengawasan DPS ke KCPS Batam	KCPS Batam	Anggota DPS dan Staff Divisi Operasional & Perencanaan Syariah serta Pemimpin KCPS
17	6-7 Agustus 2018	Pengawasan DPS ke KCPS Tg Balai Karimun dan KCS Tg Pinang	KCPS Tg Balai Karimun dan KCS Tg Pinang	Anggota DPS dan Staff Divisi Operasional & Perencanaan Syariah serta Pemimpin KCPS
18	9 Agustus 2018	Pengawasan DPS ke KCPS Taluk Kuantan	KCPS Taluk Kuantan	Anggota DPS dan Staff Divisi Operasional & Perencanaan Syariah
19	10 Agustus 2018	Pengawasan DPS ke KCPS Pasir Pengarayan	KCPS Pasir Pengarayan	Anggota DPS dan Staff Divisi Operasional & Perencanaan Syariah
20	17 Agustus 2018	Mengikuti Apel Hut Kemerekaan RI	Lapangan Menara Dang Merdu BRK	Dewan Pengawas Syariah
21	9 September 2018	Dewan Pengawas Syariah mengikuti ujian sertifikasi kompetensi bagi DPS	Jakarta	Dewan Pengawas Syariah
22	24 September 2018	Rapat Pembahasan beberapa produk dan hal Hal terkait opini syariah	Ruang Rapat Lt 11 MDM BRK	DPS,Divisi Bisnis Syariah dan Divisi Operasional & Perencanaan Syariah

Frekuensi Rapat

Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Riau Kepri telah mengadakan dan mengikuti beberapa rapat terkait dengan pembahasan pengembangan produk, pengeluaran opini syariah, jasa Bank, operasional Bank dan lain-lainnya yang berhubungan dengan aspek syariah. Di dalam ketentuan Bank Indonesia, rapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Selama tahun 2018 DPS PT. Bank Riau Kepri telah mengikuti rapat intern UUS PT. Bank Riau Kepri dan Rapat ekstern dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.

Berikut tabel frekuensi Rapat DPS selama tahun 2018 :

Nama	Tingkat Kehadiran		Total Kehadiran
	Rapat Intern dengan PT. Bank Riau Kepri	Rapat Ekstern dengan DSN-MUI	
Dr. H. Suryan Al Jamrah	12	1	13
Drs. KH. Tengku Zulkarnain,MA	13	1	14

Berikut rincian rapat yang diikuti oleh DPS selama tahun 2018 :

No	Tanggal	Aktivitas DPS	Tempat	Keterangan
1	10 Januari 2018	Rapat rutin dan penentuan Jadwal pengawasan semester I	Ruang rapat lt.11 MDM Bank Riau Kepri	Ketua DPS dan Staff Divisi Syariah
2	22 Januari 2018	Rapat membahas hasil Pengawasan di KCPS Tg Balai Karimun	KCPS Tg Balai Karimun	Anggota DPS dan Staff Divisi Syariah serta Pemimpin KCPS
3	23 Januari 2018	Rapat membahas hasil Pengawasan di KCPS Panam	KCPS Panam	Anggota DPS dan Staff Divisi Syariah serta Pemimpin KCPS
4	24 Januari 2018	Rapat membahas hasil Pengawasan di KCS Pekanbaru	KCS Pekanbaru	Anggota DPS dan Staff Divisi Syariah serta Pemimpin KCS
5	24 Januari 2018	Rapat membahas hasil Pengawasan DPS di KCPS Tembilahan	KCPS Tembilahan	Ketua DPS dan Staff Divisi Syariah serta Pemimpin KCPS
6	25 Januari 2018	Rapat membahas hasil Pengawasan di KCPS Taluk Kuantan	KCPS Taluk Kuantan	Ketua DPS dan Staff Divisi Syariah serta Pemimpin KCPS
7	29 Januari 2018	Rapat membahas hasil Pengawasan DPS di KCS Tanjung Pinang	KCS Tanjung Pinang	Anggota DPS dan Staff Divisi Syariah serta Pemimpin KCS
8	29 Januari 2018	Rapat membahas hasil Pengawasan di KCPS Duri	KCPS Duri	Ketua DPS dan Staff Divisi Syariah serta Pemimpin KCPS
9	5 Februari 2018	Rapat membahas hasil Pengawasan di KCPS Batam	KCPS Batam	Ketua DPS dan Staff Divisi Syariah serta Pemimpin KCPS
10	6 Juni 2018	Rapat dengan Divisi Syariah terkait pembiayaan sindikasi	Ruang Rapat Lt 11 MDM BRK	DPS,Divisi bisnis Syariah dan Divisi Operasional & Perencanaan Syariah
11	12 Juli 2018	Rapat penentuan jadwal pengawasan semester II	Ruang Rapat Lt 11 MDM BRK	DPS dan Divisi Operasional & Perencanaan Syariah
12	23 Juli 2018	Rapat membahas hasil Pengawasan di KCPS Tembilahan	KCPS Tembilahan	Ketua DPS dan Staff Divisi Operasional & Perencanaan Syariah serta Pemimpin KCPS
13	27 Juli 2018	Rapat membahas hasil Pengawasan di KCPS Panam	KCPS Panam	Ketua DPS dan Staff Divisi Operasional & Perencanaan Syariah serta Pemimpin KCPS
14	30 Juli 2018	Rapat membahas hasil Pengawasan di KCPS Duri	KCPS Duri	Anggota DPS, Staff Divisi Operasional & Perencanaan Syariah dan Pemimpin KCPS

15	1 Agustus 2018	Rapat membahas hasil Pengawasan di KCS Pekanbaru	KCS Pekanbaru	Ketua DPS dan Staff Divisi Operasional & Perencanaan Syariah serta Pemimpin KCS
16	6 Agustus 2018	Rapat membahas hasil Pengawasan di KCPS Batam	KCPS Batam	Anggota DPS dan Staff Divisi Operasional & Perencanaan Syariah serta Pemimpin KCPS
17	7 Agustus 2018	Rapat membahas hasil Pengawasan di Tg Balai Karimun dan KCS Tg Pinang	KCPS Tg Balai Karimun dan KCS Tg Pinang	Anggota DPS dan Staff Divisi Operasional & Perencanaan Syariah serta Pemimpin KCS & KCPS
18	9 Agustus 2018	Rapat membahas hasil Pengawasan di KCPS Taluk Kuantan	KCPS Taluk Kuantan	Anggota DPS dan Staff Divisi Operasional & Perencanaan Syariah serta Pemimpin KCPS
19	10 Agustus 2018	Rapat membahas hasil Pengawasan DPS di Pasir Pengarayan	KCPS Pasir Pengarayan	Anggota DPS dan Staff Divisi Operasional & Perencanaan Syariah serta Pemimpin KCPS
20	24 September 2018	Rapat Pembahasan beberapa produk dan hal Hal terkait opini syariah	Ruang Rapat Lt 11 MDM BRK	DPS,Divisi Bisnis Syariah dan Divisi Operasional & Perencanaan Syariah
21	2 Oktober 2018	Pra Ijtima' Sanawi tahun 2018	Gedung DSN-MUI Jakarta	Dewan Pengawas Syariah

Remunerasi dan Fasilitas Lainnya DPS

Remunerasi yang dimaksud adalah penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya.

Fasilitas lain yang dimaksud adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Berikut tabel Remunerasi dan Fasilitas lainnya DPS Bank Riau Kepri :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun	
		Orang	Jutaan Rupiah
1.	Remunerasi	2	Rp477,90,-
2.	Fasilitas lainnya :	-	-
	a. Yang dapat dimiliki	-	-
	b. Yang tidak dapat dimiliki	-	-
Total			Rp477,90,-

Jumlah anggota DPS Bank Riau Kepri yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp. 2 miliar	-
di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-
di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-
Rp. 500 juta ke bawah	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

Rangkap Jabatan DPS Pada LKS Lain.

Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Riau Kepri atas nama Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA sejak tahun 2011 hingga saat ini, yang bersangkutan juga menjabat sebagai DPS pada Trihamas Finance Syariah Jakarta.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Permasalahan Hukum Yang Terjadi

Yang dimaksud dengan "*internal fraud*" adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional UUS yang mempengaruhi kondisi keuangan UUS secara signifikan. Yang dimaksud dengan *"mempengaruhi kondisi keuangan UUS PT. Bank Riau Kepri secara signifikan"* adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk penyimpangan (*internal fraud*) sebagaimana yang disebut diatas telah terjadi pada UUS PT. Bank Riau Kepri selama tahun 2018, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Internal *Fraud* dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan :					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018
Total *Fraud*	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Yang dimaksud dengan "*permasalahan hukum*" adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS selama periode tahun 2018 dan telah diajukan melalui proses hukum. Untuk permasalahan hukum sebagaimana yang dimaksud tersebut, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	-	2
Total	1	2

Pendapatan Non Halal Dan Penggunaannya

Pendapatan non halal yang dimaksud adalah pendapatan yang didapatkan dari usaha berbasis bunga (ribawi) atau bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh dari pendapatan ini adalah pendapatan bunga dari penempatan dana antar Bank pada Bank Konvensional.

Unit Usaha Syariah Bank Riau Kepri selama tahun 2018 tidak ada memiliki pendapatan dari pendapatan non halal sebagaimana dimaksud di atas.

Penggunaan Konsultan atau Penasehat

Pada tahun 2018 Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau Kepri menggunakan jasa Konsultan sebagaimana tabel berikut :

No	Nama Konsultan/Vendor	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Keterangan
1	PT. Karim Consulting Indonesia	Jasa Konsultan	Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembuatan SOP deposito IB Mudharabah muqayadah (MMoB) dan pembiayaan yang Sumber dananya berasal dari MMoB	Selesai
2	Wiroso	Asistensi PAPSI 2013	Asistensi penerapan PAPSI pada Vision Syariah	Selesai

PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan sekitarnya Bank Riau Kepri telah menyediakan dana untuk kegiatan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemuda, olahraga, seni, budaya dan kesehatan.

Sepanjang tahun 2018 Bank telah memberikan bantuan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkannya dengan total sebesar Rp20.360.465.167,- yang terbagi atas Dana Kemitraan dan Dana Bantuan Kemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Kemitraan

No.	Kegiatan	Nominal (dalam Rupiah)
1	Bidang Adat/Seni/Budaya	322.400.000,-
2	Bidang Keagamaaan	7.160.772.143,-
3	Bidang Kesehatan	19.635.000,-
4	Bidang Lingkungan Hidup	1.196.441.000,-
5	Bidang Pendidikan	2.974.417.000,-
6	Bidang Sosial Kemasyarakatan	6.689.097.824,-
Total		**18.362.762.967,-**

2. Dana Bantuan Kemasyarakatan

Total Dana Bantuan Kemasyarakatan yang telah direalisasikan oleh Bank sepanjang tahun 2018 adalah Rp 1.997.702.200,- yang disalurkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, kebudayaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

KEGIATAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK TAHUN 2018

Penilaian Penerapan Tata Kelola oleh Pihak Eksternal (*Third party assessment)*

Salah satu kegiatan penerapan Tata Kelola yang dilaksanakan oleh Bank pada tahun 2018 adalah *third party assessment* (penilaian penerapan Tata Kelola oleh Pihak Eksternal). *Third party assessment* dilaksanakan melalui kegiatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan majalah SWA.

CGPI merupakan kegiatan riset serta pemeringkatan penerapan Tata Kelola yang Baik pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset, yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep *Corporate Governance* dengan tujuan melakukan perbaikan secara berkesinambungan (*continuous improvement*) serta melakukan evaluasi dan studi banding (*benchmarking*). Program riset dan pemeringkatan CGPI yang telah diselenggarakan sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini merupakan upaya kontribusi IICG dalam mendorong praktik Tata Kelola yang Baik di Indonesia.

IICG merupakan lembaga independen yang melaksanakan kajian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan implementasi tata kelola korporasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan konsep, praktik dan manfaat Tata Kelola yang Baik demi terciptanya dunia usaha yang tepercaya dan berkelanjutan.

Atas kegiatan CGPI yang telah diikuti, Bank mendapat rating **"*Trusted Company*"** dengan total nilai yang diperoleh sebesar 80,02 dari total skor 100 dengan rincian sebagai berikut :

Aspek Penilaian	Nilai
Governance Structure	20,58
Governance Process	34,46
Governance Outcome	24,98
Total Nilai	**80,02**

Penghargaan Tata Kelola Perusahaan

Sebagai perwujudan dari penguatan tata kelola perusahaan yang terus dilakukan, sepanjang tahun 2018, Bank berhasil memperoleh sejumlah penghargaan di bidang tata kelola perusahaan yang menunjukkan penerapan tata kelola perusahaan. Penghargaan yang diraih sebagai berikut :

PENGHARGAAN BANK DI BIDANG TATA KELOLA PERUSAHAAN	
Penghargaan	**Instansi Penyelenggara**
Perusahaan Terpercaya pada *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) *Award* 2018	*The Indonesian Institute for Corporate Governance* dan Majalah SWA
Top CSR *Improvement* 2018	*Business News* Indonesia bekerjasama dengan KNKG dan CSR *Society* Indonesia
Platinum Peringkat 1 Indonesia *Legal Award* 2018	*Economic Review*, Indonesia Asia *Institute*, Perbanas *Intitute*, Binus *University Business School*
Indonesia *Enterprise Risk Management Award* 2018	Economic *Review*, Indonesia Asia *Institute*
The Best IT Data Governance 2018	ABDI (Asosiasi Big Data & AI), SingEx (PT Omnie Comm Expo) Singapore *Event Manager*

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PENERAPAN TATA KELOLA BANK

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank diwajibkan melaksanakan Penilaian Sendiri *(self assesment)* Penerapan Tata Kelola secara berkala yang dilakukan untuk setiap semester. Pelaporan Penilaian Sendiri *(self assesment)* Penerapan Tata Kelola dilakukan secara berkala sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (TKB).

Untuk laporan Penilaian Sendiri *(self assesment)* Penerapan Tata Kelola Bank dalam rangka Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2018 disusun sesuai dengan format sebagaimana lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu sebagai berikut :

I. Periode Semester I tahun 2018 (Juni 2018)

<table>
<tr><td colspan="3">Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola</td></tr>
<tr><td colspan="2">Peringkat</td><td>Definisi Peringkat</td></tr>
<tr><td>Individual</td><td>3</td><td>Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Analisis</td></tr>
<tr><td colspan="3">Untuk periode Januari s.d. Juni 2018, Bank telah melakukan self assessment (penilaian sendiri) terhadap penerapan Tata Kelola Bank Riau Kepri yang secara umum dinilai cukup baik, hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang termuat di dalam Governance Structure, Governance Process maupun pada Governance Outcome.

Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan penerapan Tata Kelola di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi governance structure, governance process dan governance outcome.</td></tr>
</table>

Governance Structure

1. Aspek positif

   a. Jumlah Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi dua orang Komisaris Independen dan satu orang Komisaris Non Independen. Hal ini telah memenuhi persyaratan jumlah dan komposisi minimal Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam :

      - Pasal 23 ayat 1 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
      - Pasal 24 ayat 2 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
      - Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Bank.

   b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kemauan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

      Salah satu bentuk pembelajaran yang berkelanjutan antara lain adalah dengan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Direksi dalam berbagai pelatihan/seminar maupun workhsop terkait dengan bidang tugasnya.

   c. Saat ini seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris telah diketuai oleh Komisaris Independen sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank.

      Meskipun masih terdapat 2 (dua) Komite yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen yang sama, namun hal ini tidak melanggar ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank.

   d. Sepanjang periode laporan, Bank telah melakukan peningkatan kompetensi dalam bentuk pemberian pelatihan, *workshop* dan sosialisasi kepada pegawai pelaksana, pemimpin seksi, auditor kantor cabang, pemimpin cabang, cabang pembantu dan kedai.

      Dalam pemenuhan kecukupan SDM, Bank telah melakukan rekrutmen pegawai setingkat PTT untuk posisi *Relationship Officer* (RO) dan *Funding Officer* (FO).

2. Aspek Negatif

   a. Terdapat organ Direksi Bank yang belum terpenuhi (diisi) yaitu Direktur Dana & Jasa serta Direktur Kredit & Syariah berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank terkini.

   b. Bank telah mengajukan beberapa calon Pengurus guna melengkapi struktur Direksi Bank, namun belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan OJK.

   c. Masih kurangnya auditor yang telah memiliki sertifikat profesi auditor QIA maupun gelar profesi auditor lainnya seperti CIA, CBIA, CISA atau CFE.

Governance Process

1. Aspek positif

   a. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan serta memberikan nasihat/arahan kepada Direksi antara lain dalam bentuk :

      - arahan tindak lanjut komitmen Bank kepada pihak regulator;
      - arahan untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari auditor internal Bank;
      - arahan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh Bank sesuai Rencana Bisnis Bank.

   b. Direksi telah melakukan pemantauan jaringan kantor dengan mengundang pemimpin jaringan kantor, khususnya untuk kantor-kantor yang memiliki trend peningkatan NPL dan performa dalam pencapaian target yang belum optimal.

   c. Sepanjang periode laporan *self assesment* ini, Bank telah menindaklanjuti temuan yang memiliki komitmen dari bulan Januari – Juni 2018 sebanyak 110 komitmen. Dari seluruh komitmen tersebut Bank telah menyelesaikan 93% komitmen (102 komitmen dari total 110 komitmen) dan 7% (8 komitmen) masih dalam proses tindak lanjut.

   d. Untuk penyediaan dana dalam jumlah besar Bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian yang dilakukan melalui mekanisme pengujian kepatuhan terhadap pemberian kredit yang merupakan kewenangan memutus Rapat Direksi.

2. Aspek Negatif

   a. Masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan aktivitas operasional di kantor Bank yang belum sesuai dengan ketentuan.

   b. Sepanjang periode laporan masih terdapat pelanggaran yang belum diputuskan sanksinya oleh manajemen Bank.

   c. Peningkatan mutu dan kualitas keterampilan auditor belum memberikan hasil optimal untuk kepentingan audit seperti audit IT dan Treasury.

Governance Outcome

1. Aspek positif

   a. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank. Hal ini terlihat dari penyampaian Rencana Bisnis Bank dan realisasinya kepada seluruh jenjang organisasi Bank pada setiap rapat kinerja triwulanan.

   b. Bank berkomitmen untuk membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional bank baik melalui sosialisasi/pelatihan dan penandatanganan *Code of Conduct*, sosialisasi *Whistle Blowing System* (WBS), monitoring kepatuhan pada jaringan kantor Bank dan pencantuman komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal tepat waktu di dalam KPI Pemimpin Satuan Kerja.

   c. Direksi telah menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit inten Bank tahun 2017 kepada RUPS yang disampaikan pada RUPS Tahunan yang

diselenggarakan pada tanggal 09 Februari 2017 di Pekanbaru.

d. Bank telah menyampaikan laporan-laporan secara lengkap dan tepat waktu seperti laporan publikasi, laporan keuangan, laporan tingkat kesehatan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola, laporan BMPK dan laporan-laporan lainnya kepada pihak regulator maupun pihak-pihak terkait lainnya.

2. Aspek Negatif

a. Sepanjang periode pelaporan terdapat :

- sanksi dari OJK kepada Bank atas keterlambatan pelaporan realisasi Layanan Safe Deposit Box;
- denda akibat kesalahan dalam pelaporan LHBU, dan
- denda akibat keterlambatan setoran pajak.

b. Pencapaian target Bank semester I tahun 2018 belum sepenuhnya tercapai sesuai target RBB. Hal ini terlihat dari masih terdapat deviasi dalam realiasi pencapaian target Bank sesuai Rencana Bisnis Bank antara lain belum tercapainya target penyaluran kredit, target *fee based income* dan target pencapaian laba.

II. Periode Semester II tahun 2018 (Desember 2018)

<table>
<tr><td colspan="3">Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola</td></tr>
<tr><td colspan="2">Peringkat</td><td>Definisi Peringkat</td></tr>
<tr><td>Individual</td><td>3</td><td>Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Analisis</td></tr>
<tr><td colspan="3">Untuk periode Juli s.d. Desember 2018, Bank telah melakukan self assessment (penilaian sendiri) terhadap penerapan Tata Kelola Bank Riau Kepri yang secara umum dinilai cukup baik, hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang termuat di dalam Governance Structure, Governance Process maupun pada Governance Outcome.

Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan penerapan Tata Kelola di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi governance structure, governance process dan governance outcome.</td></tr>
</table>

Governance Structure

1. Aspek positif

   a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kemauan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

      Salah satu bentuk pembelajaran yang berkelanjutan antara lain adalah dengan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Direksi dalam berbagai pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya.

   b. Sepanjang periode laporan, Komite di bawah Dewan Komisaris telah diketuai oleh Komisaris Independen sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank.

      Meskipun masih terdapat 2 (dua) Komite yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen yang sama, namun hal ini tidak melanggar ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank.

   c. Sepanjang periode laporan, Bank telah melakukan peningkatan kompetensi dalam bentuk pemberian pelatihan, *workshop* dan sosialisasi kepada pegawai pelaksana, pemimpin seksi, auditor kantor cabang, pemimpin cabang, cabang pembantu dan kedai.

      Dalam pemenuhan kecukupan SDM, Bank telah melakukan rekrutmen pegawai setingkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) baik untuk wilayah Riau maupun wilayah Kepulauan Riau.

2. Aspek Negatif

   a. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu :

      1) H.R. Mambang Mit

      2) A. Rivaie Rachman

      3) Taufiqurrahman

      Namun, untuk salah satu anggota Dewan Komisaris yaitu A. Rivaie Rachman (Komisaris Independen) telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 28 Desember 2018. RUPSL LB tertanggal 29 November 2018 menyetujui perpanjangan sementara masa jabatan ybs. sampai dengan diangkatnya Komisaris Independen defenitif.

      Namun, berdasarkan Surat OJK No. S-1908/KO.053/2018 tanggal 20 Desember 2018, OJK menyampaikan bahwa perpanjangan sementara ybs. tidak dapat dicatat dalam administrasi pengawasan OJK mengingat perpanjangan sementara tersebut tidak memiliki dasar hukum sebagaimana diatur di dalam PBI/POJK dan anggaran dasar Bank, sehingga per tanggal 29 Desember 2018 komposisi Dewan Komisaris Bank terdiri dari 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Komisaris Non Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Independen.

Hal ini berdampak pada komposisi Dewan Komisaris Bank yang tidak memenuhi persyaratan jumlah dan komposisi minimal Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mensyaratkan jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.

Untuk kekurangan komposisi Dewan Komisaris tersebut, Bank pada tanggal 31 Desember 2018 telah mengajukan 2 (dua) orang calon Komisaris Independen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

b. Terdapat organ Direksi Bank yang belum terpenuhi (diisi) yaitu Direktur Dana & Jasa serta Direktur Kredit & Syariah berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank terkini.

   Berdasarkan RUPS LB tanggal 29 November 2018, RUPS menetapkan 2 (dua) orang calon Direktur Dana & Jasa dan 2 (dua) orang calon Direktur Kredit & Syariah untuk diajukan dan dimintakan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

   Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2018 Bank telah mengajukan calon-calon Direksi tersebut kepada OJK untuk dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

c. Untuk periode laporan ini, Bank tidak memiliki auditor yang bersertifikasi profesi auditor QIA, mengingat sebelumnya 2 (dua) orang auditor Bank yang memiliki sertifikasi auditor QIA telah pensiun dari Bank dan dimutasi ke unit kerja lain.

Governance Process

1. Aspek positif

   a. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan serta memberikan nasihat/arahan kepada Direksi antara lain dalam bentuk :

      - arahan tindak lanjut komitmen Bank kepada pihak regulator;
      - arahan untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari auditor internal Bank;
      - arahan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh Bank sesuai Rencana Bisnis Bank.

   b. Direksi telah melakukan pemantauan jaringan kantor dengan mengundang pemimpin jaringan kantor, khususnya untuk kantor-kantor yang memiliki trend peningkatan NPL dan performa dalam pencapaian target yang belum optimal.

   c. Sepanjang periode laporan *self assesment* ini, Bank telah menindaklanjuti temuan yang memiliki komitmen dari bulan Juli– Desember 2018 sebanyak 117 komitmen. Dari seluruh komitmen tersebut Bank telah menyelesaikan 91% komitmen (107 komitmen dari total 117 komitmen) dan 9% (10 komitmen) masih dalam proses tindak lanjut.

d. Untuk penyediaan dana dalam jumlah besar Bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian yang dilakukan melalui mekanisme pengujian kepatuhan terhadap pemberian kredit yang merupakan kewenangan memutus Rapat Direksi.

2. Aspek Negatif

a. Masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan aktivitas operasional di kantor Bank dan prosedur pemberian kredit.

b. Sepanjang periode laporan masih terdapat pelanggaran yang belum diputuskan sanksinya oleh manajemen Bank.

c. Bank belum mengungkapkan benturan kepentingan dalam persetujuan pemberian kredit kepada pihak terkait yaitu :

- Pemberian Kredit Aneka Guna (KAG) kepada Catur Sugeng Susanto yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Kampar.
- Pemberian Kredit Aneka Guna (KAG) kepada Mursini yang merupakan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Governance Outcome

1. Aspek positif

a. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank. Hal ini terlihat dari penyampaian Rencana Bisnis Bank dan realisasinya kepada seluruh jenjang organisasi Bank pada setiap rapat kinerja triwulanan.

b. Bank berkomitmen untuk membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional bank baik melalui sosialisasi/pelatihan dan penandatanganan *Code of Conduct*, sosialisasi *Whistle Blowing System* (WBS), monitoring kepatuhan pada jaringan kantor Bank dan pencantuman komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal tepat waktu di dalam KPI Pemimpin Satuan Kerja.

c. Bank telah menyampaikan laporan-laporan secara lengkap dan tepat waktu seperti laporan publikasi, laporan keuangan, laporan tingkat kesehatan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola, laporan BMPK dan laporan-laporan lainnya kepada pihak regulator maupun pihak-pihak terkait lainnya.

d. Bank memperoleh predikat sebagai salah satu Perusahaan Terpercaya dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang merupakan lembaga independen yang melakukan penilaian penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan keuangan dan non keuangan di Indonesia.

2. Aspek Negatif

a. Sepanjang periode pelaporan masih terdapat denda akibat kesalahan dalam pelaporan LBU/SLIK.

b. Pencapaian target Bank semester II tahun 2018 belum sepenuhnya tercapai sesuai target RBB. Hal ini terlihat dari masih terdapat deviasi dalam realiasi pencapaian target Bank sesuai Rencana Bisnis Bank antara lain belum tercapainya target penyaluran kredit, target DPK dan target pencapaian laba.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dimaklumi, terima kasih.

PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri

bank riaukepri
Direksi

Mambang Mit	**Irvandi Gustari**
Komisaris Utama	Direktur Utama